



LAPORAN PENELITIAN SMERU

# STUDI *BASELINE* EVALUASI BASABALI TERHADAP PARTISIPASI SIPIL PEMUDA DI BALI DAN SULAWESI SELATAN

Jimmy Berlianto, Akhmedi, Wawan Kurniawan, Pande Made Kutanegara

**DRAF.** Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".

LAPORAN PENELITIAN SMERU

STUDI *BASELINE* EVALUASI BASABALI TERHADAP  
PARTISIPASI SIPIL PEMUDA DI BALI DAN SULAWESI  
SELATAN

Jimmy Berlianto

Akhmadi

Wawan Kurniawan

Pande Made Kutanegara

The SMERU Research Institute

September 2021

# Studi *Baseline* Evaluasi BASAbali terhadap Partisipasi Sipil Pemuda di Bali dan Sulawesi Selatan

Penulis: Jimmy Berlianto, Akhmadi, Wawan Kurniawan, Pande Made Kutanegara

Foto Sampul: Mukti Mulyana

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

# Tim Peneliti

## **Peneliti SMERU**

Jimmy Berlianto

Akhmadi

Wawan Kurniawan

Pande Made Kutanegara

## **Peneliti Lapangan**

Andi Kasirang T. Baso

Andi Sukma Indah

Andi Tenri Darhyati

Ida Ayu Cintiya Nurina

I Komang Lindayani

Muh. Ahyar Hamka

Ni Komang Erny Astiti

Ni Wayan Suarniti

# Ucapan Terima Kasih

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Tim studi ini berterima kasih kepada Fondation Botnar atas dukungan penuh yang diberikan hingga selesainya studi ini. Kami juga ingin mengucapkan apresiasi sedalam-dalamnya kepada BASAbali yang telah memercayakan studi ini kepada kami dan membantu kami selama proses studi. Studi ini berhasil diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak dari BASAbali dan Rumata ArtSpace serta dengan kerja sama di antara semua pemangku kepentingan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada (i) Alissa Stern, Putu Eka Guna Yasa, dan Ni Nyoman Clara Listya Dewi dari BASAbali dan (ii) Lily Yulianti Farid dari Rumata ArtSpace yang telah membantu studi ini dan memberikan masukan konstruktif selama persiapan dan dalam penulisan laporan ini. Apresiasi juga kami layangkan kepada tim dari The SMERU Research Institute, Rumata ArtSpace, dan BASAbali atas kolaborasi yang apik dalam proses pengumpulan data. Terakhir, kami sampaikan terima kasih tulus kami kepada Sudiarno atas bantuan yang diberikan dalam mengedit laporan ini.

# Abstrak

## Studi *Baseline* Evaluasi BASAbali terhadap Partisipasi Sipil Pemuda di Bali dan Sulawesi Selatan

Jimmy Berlianto, Akhmadi, Wawan Kurniawan, Pande Made Kutanegara

Partisipasi sipil pemuda memiliki peran penting di masyarakat melalui tindakan mereka untuk mengatasi isu-isu publik. Partisipasi sipil oleh anak-anak muda bisa bersifat sukarela atau wajib (didorong oleh norma/undang-undang) dan dilakukan secara sendiri-sendiri atau kolektif. Dalam studi *baseline* ini, kami mengeksplorasi profil dan situasi partisipasi sipil pemuda saat ini di wilayah Kota Denpasar, Kota Makassar dan sekitarnya untuk menelusuri perubahan-perubahan pada partisipasi sipil pemuda dan sikap pemuda terhadap partisipasi sipil melalui program BASAbali, yang akan digunakan pada studi-studi selanjutnya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dilakukan dengan responden pemuda, pejabat pemerintah daerah, dan akademisi setempat. Studi ini menemukan bahwa konsentrasi dan faktor-faktor mendasar yang memengaruhi situasi partisipasi sipil pemuda saat ini berbeda di antara kedua wilayah. Norma-norma sosial berdasarkan budaya dan adat menjadi pendorong umum partisipasi sipil pemuda di Kota Denpasar dan sekitarnya. Nilai-nilai kolektif dan perkembangan pesat komunitas sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya. Namun, partisipasi sipil pemuda di kedua wilayah masih terbatas, seperti dalam hal ruang lingkup isu-isu yang diangkat dan pengaruh tekanan sosial. Selain itu, pemuda di kedua wilayah umumnya hanya terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi yang tidak terlalu kompleks. Dalam hal ini, mengingat beberapa faktor penghambat mungkin merecoki dan ekosistem pendukung sudah tersedia, dapat dikatakan bahwa masih ada ruang untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi sipil pemuda di kedua wilayah. Oleh karenanya, pada studi-studi selanjutnya, kompleksitas dan nuansa partisipasi sipil pemuda perlu ditelisik lebih lanjut, misalnya dengan mengeksplorasi tingkat partisipasi dan pengaruh dari partisipasi berbasis kelompok terhadap partisipasi sipil secara umum.

Kata kunci: partisipasi sipil pemuda, partisipasi sukarela, partisipasi wajib, inisiatif pribadi

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv
Daftar Singkatan dan Akronim	v
Rangkuman Eksekutif	vi
I. Pendahuluan	1
II. Metodologi	2
2.1 Pengumpulan Data dan Metode Analisis	2
2.2 Profil Informan	3
2.3 Konteks Wilayah Studi	5
III. Partisipasi Sipil	9
3.1 Definisi Partisipasi Sipil	9
3.2 Struktur dan Tipologi Partisipasi Sipil	10
3.3 Partisipasi Sipil dan Bahasa Daerah	13
IV. Temuan Partisipasi Sipil Pemuda: Kota Denpasar dan Sekitarnya	14
4.1 Bentuk Partisipasi Sipil Pemuda	14
4.2 Faktor dan Aktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Sipil Pemuda	20
V. Temuan Partisipasi Sipil Pemuda: Kota Makassar dan Sekitarnya	25
5.1 Bentuk Partisipasi Sipil Pemuda	25
5.2 Faktor dan Aktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Sipil Pemuda	30
VI. Kesimpulan: Pelajaran Terpetik	35
Daftar Acuan	39
Lampiran	42

# Daftar Tabel

- Tabel 1. Jumlah Informan di Bali | 2  
Tabel 2. Profil Informan | 4  
Tabel 3. Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Setiap Kecamatan Kota Denpasar | 5  
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Usia 15–29 Tahun | 5  
Tabel 5. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan | 6  
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kelompok Usia 15–29 Tahun | 7  
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kelompok Usia 15–29 Tahun | 7  
Tabel 8. Definisi dan Tipologi Partisipasi Sipil Pemuda | 12

# Daftar Gambar

- Gambar 1. Diagram partisipasi sipil pemuda | 12  
Gambar 2. Partisipasi sipil pemuda di Bali | 18  
Gambar 3. Bentuk dan proses partisipasi sipil pemuda | 19  
Gambar 4. Partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya | 28  
Gambar 5. Bentuk dan proses partisipasi sipil pemuda | 29  
Gambar 6. Aktor yang memengaruhi pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya | 33

# Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Sipil Pemuda yang Teridentifikasi di Wilayah Kota Denpasar dan Sekitarnya | 43  
Lampiran 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Sipil Pemuda yang Teridentifikasi Di Wilayah Kota Makassar dan Sekitarnya | 44

# Daftar Singkatan dan Akronim

<b>Bekraf</b>	Badan Ekonomi Kreatif
<b>BEM</b>	Badan Eksekutif Mahasiswa
<b>COVID-19</b>	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
<b>ForBALI</b>	Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi
<b>Kemendikbud</b>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Kopsling</b>	Komunitas Pemuda Pemerhati Sosial dan Lingkungan
<b>ornop</b>	organisasi nonpemerintah
<b>OSIS</b>	Organisasi Siswa Intra Sekolah
<b>Paskibraka</b>	Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
<b>PKM</b>	Pesta Komunitas Makassar
<b>PLN</b>	Perusahaan Listrik Negara
<b>UNICEF</b>	United Nations Children's Fund
<b>Rohis</b>	Kerohanian Islam
<b>SMA</b>	sekolah menengah atas
<b>SMP</b>	sekolah menengah pertama
<b>STT</b>	Seka Teruna Teruni
<b>UU ITE</b>	Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

# Rangkuman Eksekutif

Studi ini adalah studi *baseline* dari studi 3 tahun tentang partisipasi sipil pemuda di wilayah Kota Denpasar, Kota Makassar dan sekitarnya. Studi ini dilakukan terutama untuk melihat kemampuan pendekatan keterlibatan BASAbali dan kompetisi Wikithon dalam mengubah partisipasi publik pemuda di Bali dan dapat direplikasi atau tidaknya program tersebut dari Bali ke wilayah Kota Makassar. Secara khusus, studi *baseline* ini mengeksplorasi konsep partisipasi sipil pemuda dan situasi partisipasi sipil pemuda saat ini di kedua wilayah studi. Konsep dan situasi terkini tersebut dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya tinjauan literatur dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan datanya dan analisis matriks sebagai alat analisisnya. Informasi dan wawasan yang dihasilkan dalam studi ini akan berguna untuk menangkap perubahan pola partisipasi sipil pemuda dan perubahan perilaku pemuda di kedua wilayah studi terhadap partisipasi sipil berkat program BASAbali/Wikithon.

Berdasarkan tinjauan literatur, partisipasi sipil pemuda didefinisikan sebagai tindakan atau minat terhadap isu-isu publik, secara sendiri-sendiri atau kolektif, untuk kesejahteraan meningkatkan masyarakat/kelompok. Definisi ini dioperasionisasikan dan dikategorikan menjadi tiga tipe atau variabel utama partisipasi sipil, yakni (i) partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, (ii) partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban, dan (iii) partisipasi berbasis kelompok. Dengan ketiga tipe partisipasi ini, kami menangkap bentuk dan pola partisipasi, khususnya melalui tindakan (perilaku) dan nuansa partisipasi sipil pemuda, seperti partisipasi sukarela dan wajib.

Pertama, di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya, kami menemukan bahwa partisipasi sipil pemuda lebih terkonsentrasi pada partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban karena kuatnya pengaruh budaya dan adat istiadat di masyarakat daerah Bali. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda di Bali umumnya terlibat di ranah publik melalui partisipasi sipil, tetapi partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya Bali. Misalnya, sebagian besar responden pemuda berpartisipasi pada kegiatan ngayah dan menjadi bagian dari STT (seka teruna teruni) di masyarakat lokal mereka. Partisipasi mereka didorong oleh rasa identitas, tanggung jawab, dan juga dipengaruhi oleh sanksi sosial bagi mereka yang tidak ikut dalam beberapa kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat dan budaya Bali.

Dua faktor intrinsic diketahui memengaruhi kecenderungan pemuda terhadap partisipasi sipil dan dua faktor ini berhubungan dengan kapasitas dan risiko. Sebagian pemuda mengungkapkan bahwa mereka takut menyuarakan pendapat tentang isu-isu publik karena adanya risiko mendapat balasan. Sebagian pemuda juga menyatakan bahwa mereka tidak punya kapasitas untuk berpartisipasi, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang beberapa isu, sehingga mereka kurang percaya diri untuk terlibat. Hal ini sangat relevan untuk bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan ekspresi sosial atau politik di media sosial atau platform publik lain.

Faktor eksternal juga diketahui memengaruhi bentuk dan pola partisipasi sipil pemuda di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya, yakni pengaruh komunitas/organisasi publik.

Responden yang terlibat dalam organisasi publik yang mengangkat beberapa isu publik cenderung terlibat di lingkungan tempat tinggal mereka dan juga di arena yang lebih luas. Masyarakat di wilayah perkotaan juga membuat pemuda terpapar isu-isu yang lebih beragam dan luas. Hal ini penting mengingat Bali acap kali dipandang sebagai daerah yang tidak politis, sehingga dianggap lebih harmonis dan sesuai untuk pariwisata. Oleh karena itu, mengingat pemuda di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya cenderung sudah berpartisipasi dalam isu-isu terkait budaya, mereka pun terpapar isu-isu lain.

Kedua, di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, kami menemukan bahwa partisipasi sipil pemuda lebih terkonsentrasi pada partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi dan partisipasi berbasis kelompok. Kedua jenis partisipasi biasanya berkelindan, yakni partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban mengacu pada partisipasi berdasarkan rantai perintah saat orang berpartisipasi dalam kelompok/komunias/organisasi. Sebagai gambaran perkelindanan tersebut, sebagian responden pemuda menyelenggarakan kegiatan bersama berdasarkan inisiatif pribadi mereka, namun pada akhirnya berkolaborasi dengan inisiatif atau gagasan serupa dari pemuda lain.

Perkelindanan dan hubungan antara partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi dan partisipasi berbasis kelompok dapat secara parsial dijelaskan oleh nilai kolektif atau solidaritas di Kota Makassar. Orang-orang Makassar memiliki kebiasaan berkumpul-kumpul yang umumnya menjadi platform tempat gagasan dan inisiatif dari pemuda berkelindan. Dalam hal ini, pemuda juga cenderung lebih percaya diri mewujudkan partisipasinya sendiri atau dalam kelompok karena platform jaringan untuk terhubung dengan pemuda lain sudah ada. Dalam acara kumpul-kumpul tersebut, pemuda membicarakan dan bertukar gagasan, termasuk yang berhubungan dengan isu-isu publik dan peluang untuk berpartisipasi.

Selain nilai kolektif atau solidaritas di Kota Makassar, komunitas yang sudah ada dan sedang berkembang di Kota Makassar juga memengaruhi partisipasi sipil pemuda. Berbagai komunitas di Kota Makassar dan sekitarnya menjadi platform tempat pemuda dapat terlibat lebih lanjut pada isu-isu yang mereka minati. Komunitas-komunitas ini biasanya saling terhubung satu sama lain, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagai bagian ekosistem pendukung yang membuat partisipasi sipil pemuda dapat terealisasi. Dalam hal ini, komunitas-komunitas tersebut menjalankan peran sebagai faktor pengakomodasi bagi minat dan dorongan pemuda untuk berpartisipasi, sementara komunitas-komunitas tersebut sendiri mungkin tidak dengan sendirinya menjadi dorongan bagi pemuda untuk berpartisipasi.

Berdasarkan temuan, kami dapat melihat bahwa tiga jenis partisipasi yang digunakan dalam studi ini sangat terkontekstualisasi dan berkelindan. Partisipasi tersebut sangat terkontekstualisasi mengingat konteks kedaerahan diketahui berpengaruh terhadap bentuk dan pola partisipasi sipil pemuda di kedua wilayah studi. Misalnya, tekanan sosial dan nilai kolektivisme memengaruhi pemuda untuk berpartisipasi dalam latar kelompok, namun dengan nuansa berbeda. Hal ini perlu dipertimbangkan karena ia menunjukkan bahwa kita perlu lebih memperhatikan sifat partisipasi sipil pemuda untuk menangkap nuansa dan dinamika antara berbagai faktor dan bentuk partisipasi yang berbeda. Dengan menangkap nuansa tersebut, kita pun dapat melihat bahwa terdapat kedalaman partisipasi sipil yang berbeda yang dapat kita lihat lebih lanjut untuk memetakan pola partisipasi sipil pemuda di kedua wilayah studi. Memimpin inisiatif untuk membentuk

komunitas dan menjadi anggota komunitas sama-sama bentuk partisipasi berbasis kelompok, namun dapat dikatakan memiliki kedalaman keterlibatan atau partisipasi berbeda.

Perlu pula diperhatikan pengaruh partisipasi berbasis kelompok, khususnya partisipasi kelompok-sukarela, terhadap partisipasi sipil pemuda secara umum. Mengingat komunitas telah diketahui berpengaruh terhadap partisipasi sipil pemuda di kedua wilayah studi, partisipasi dalam kelompok/komunitas/organisasi mungkin berpengaruh dalam memperdalam atau 'menaikkan derajat' partisipasi sipil pemuda. Hal ini bisa terjadi karena pemuda lebih terpapar isu-isu publik dan bentuk partisipasi melalui kelompok tersebut. Kelompok ini mungkin juga menjalankan fungsi untuk memengaruhi dan mengubah faktor intrinsic partisipasi sipil pemuda, seperti kurangnya kepercayaan diri, sekaligus berfungsi sebagai lingkungan sosial yang mendukung bagi pemuda untuk berpartisipasi.

# I. Pendahuluan

Studi ini adalah bagian dari rangkaian studi mengenai partisipasi sipil pemuda, yakni studi *baseline* dari studi tiga tahun yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute bekerja sama dengan BASAbali. Sejauh ini, BASAbali telah melibatkan masyarakat di Bali untuk memperkuat lingkungan fisik dan budaya mereka, dengan fokus pada pemuda. Program ini juga menggunakan pendekatan keterlibatan yang diinisiasi oleh BASAbali dengan tujuan melibatkan pemuda di Bali dalam usaha meningkatkan kelayakhunian dan kesejahteraan Kota Denpasar serta mereplikasi pendekatan ini di Kota Makassar.

Studi *baseline* ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian berikut: (i) bagaimana mendefinisikan dan memahami partisipasi sipil pemuda, dan (ii) bagaimana kondisi terkini partisipasi sipil pemuda di wilayah Kota Denpasar, Kota Makassar, dan daerah sekitarnya. Seiring waktu, studi ini juga akan melihat bagaimana kompetisi Wikithon<sup>1</sup> pada situs BASAbali wiki dapat mengubah perilaku kalangan muda dalam partisipasi sipil. Terakhir, studi ini bertujuan mengetahui: (i) kemampuan pendekatan keterlibatan dan kompetisi Wikithon BASAbali dalam mengubah partisipasi publik pemuda di Bali dan (ii) apakah pendekatan ini dapat direplikasi di Kota Makassar. Program ini sendiri didesain untuk meningkatkan partisipasi publik pemuda dalam usaha meningkatkan kelayakhunian dan kesejahteraan kota-kota sekunder di Indonesia, dalam hal ini Kota Denpasar dan Kota Makassar.

Metodologi yang digunakan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian akan dijelaskan di bab Metodologi. Laporan ini disusun menjadi tiga bagian. Bab 1 dan 2 membahas latar belakang, tujuan, konteks, dan metode untuk mencapai tujuan studi. Bab 3 terutama menguraikan pertanyaan penelitian pertama. Bab 4 terutama menjabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian kedua dan ketiga. Terakhir, Bab 5 berfokus pada sorotan utama dan pelajaran terpetik dari studi ini, serta kesimpulan dari temuan studi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan pengetahuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut variabel-variabel dinamika partisipasi sipil pemuda.

---

<sup>1</sup>Kompetisi Wikithon (Wiki Marathon) adalah kompetisi tahunan menambahkan kalimat ke dalam kamus daring yang diselenggarakan oleh BASAbali.

## II. Metodologi

### 2.1 Pengumpulan Data dan Metode Analisis

Studi *baseline* ini berfokus pada usaha merekam kondisi awal dan konteks partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar, Kota Denpasar, dan wilayah sekitarnya. Data primer dalam studi *baseline* terutama dieksplorasi dari kaum muda yang belum terekspos program Wikithon sebelumnya.

Studi ini menggunakan dua metode pengumpulan data: tinjauan literatur dan wawancara mendalam. Tinjauan literatur digunakan terutama untuk mengembangkan kerangka awal dari konsep dan dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya mengenai konsep partisipasi sipil pemuda dan konteks bahasa daerah dalam partisipasi publik. Sementara itu, metode wawancara mendalam digunakan terutama untuk menilai bentuk dan pola partisipasi sipil pemuda di Kota Denpasar, Kota Makassar, dan wilayah sekitarnya sekaligus mengeksplorasi faktor-faktor dan aktor-aktor yang memengaruhi bentuk dan pola yang teridentifikasi.

Wawancara mendalam akan dijelaskan secara lebih mendetail di subbab **2.2 Profil Informan**. Wawancara dengan pemuda dimaksudkan untuk mengeksplorasi persepsi dan kegiatan/aksi yang terkait dengan partisipasi sipil pemuda. Wawancara dengan pemangku kepentingan lain dimaksudkan terutama untuk menangkap konteks dinamika pemuda di tiap wilayah dan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial-politik dan sosiokultural yang memengaruhi. Jumlah informan untuk setiap kategori informan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Informan di Bali**

Informan	Kota Denpasar dan sekitarnya	Kota Makassar dan sekitarnya
Pemuda	52	44
Pemangku kepentingan: Akademisi lokal	2	2
Pemangku kepentingan: Dinas Kepemudaan tingkat Kota	1	1
Pemangku kepentingan: Dinas Kebudayaan tingkat Kota	1	1

Hasil wawancara mendalam dianalisis melalui analisis matriks deskriptif untuk memetakan temuan dan untuk dianalisis lebih lanjut secara eksploratif, terutama terkait faktor dan aktor yang memengaruhi beserta konteksnya. Analisis dilakukan untuk tiap wilayah studi. Oleh karena itu, komparasi konteks antara Makassar dan Denpasar tidak banyak dideskripsikan. Analisis ini berfokus pada tiap lokasi studi karena studi *baseline* ini didesain terutama untuk menangkap situasi awal variabel-variabelnya.

## 2.2 Profil Informan

Ada dua kategori informan utama dalam studi ini, yaitu pemuda dan pemangku kepentingan daerah. Pemangku kepentingan daerah merujuk pada akademisi/ahli mengenai kepemudaan dan bahasa daerah, serta kantor Dinas Kepemudaan dan Kebudayaan di Kota Makassar dan Kota Denpasar. Responden dari kalangan pemuda terdistribusi di lima kota (Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan). Di Bali, informan berasal dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Di Sulawesi Selatan, informan berasal dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Jumlah keseluruhan responden pemuda adalah 97 orang, yakni 52 orang di Bali dan 45 orang di Sulawesi Selatan.

Sebagian besar informan adalah mahasiswa dengan kisaran usia 19–25 tahun. Di Bali, sebagian besar informan adalah mahasiswa di wilayah Kota Denpasar. Di Sulawesi Selatan, informan cukup tersebar, tetapi masih terkonsentrasi pada mahasiswa di wilayah Kota Makassar dan siswa SMA di wilayah Kabupaten Gowa. Sebagian besar informan di Bali berasal dari keluarga asli Bali (kedua orang tua informan adalah orang asli Bali). Sementara itu, lebih banyak informan di Kota Makassar berasal bukan dari keluarga asli Makassar. Artinya, kedua orang tua informan bukan orang asli Makassar. Perincian profil para informan ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Profil Informan**

	Kategori	Kota Denpasar dan sekitarnya	Kota Makassar dan sekitarnya
Usia	16–18	4	13
	19–25	44	23
	26–30	8	8
Jenis Kelamin	Laki-laki	22	23
	Perempuan	34	21
Wilayah	Kota Denpasar	34	-
	Kabupaten Badung	13	-
	Kabupaten Gianyar	9	-
	Kota Makassar	-	29
	Kabupaten Gowa	-	15
Latar belakang keluarga*	A	50	14
	B	3	1
	C	1	5
	D	2	23
Tingkat pendidikan terakhir	SMP	0	11
	SMA	38	16
	Diploma/Sarjana	15	17
	Magister	3	0
Pekerjaan	Mahasiswa	37	15
	Dosen	1	0
	Guru	2	0
	Ibu rumah tangga	1	0
	Karyawan	10	6
	Wirusaha	3	4
	Perawat	1	1
	Pegawai Negeri	1	2
	Pelajar	0	11
	Pekerja lepas	0	1
Tidak bekerja	0	3	

\*A = kedua orang tua asli Bali/Makassar; B & C = satu dari kedua orang tua asli Bali/Makassar; D = kedua orang tua bukan orang asli Bali/Makassar.

## 2.3 Konteks Wilayah Studi

Penelitian ini terutama dilakukan di dua kota, yaitu Kota Denpasar dan Kota Makassar. Responden dari wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya mencakup Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, sementara responden dari wilayah Kota Makassar dan sekitarnya mencakup Kabupaten Gowa. Ketiga kabupaten ini berbatasan dengan kedua kota tersebut. Kabupaten Badung berbatasan langsung dengan Denpasar, sementara Kabupaten Gianyar berbatasan langsung dengan Kota Denpasar di sebelah barat laut.

### 2.3.1 Kota Denpasar dan Sekitarnya

Kota Denpasar terdiri atas empat kecamatan, 27 desa dan 16 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Barat. Tabel di bawah menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 kilometer persegi, dan kepadatan penduduknya mencapai 5.676,27 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Denpasar Barat menjadi kecamatan terpadat di Kota Denpasar dengan kepadatan penduduk 8.601,75 jiwa per kilometer persegi.

**Tabel 3. Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Setiap Kecamatan Kota Denpasar**

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
Denpasar Selatan	49,99	217.100	4.342,87
Denpasar Timur	22,31	128.276	5.749,71
Denpasar Barat	24,06	206.958	8.601,75
Denpasar Utara	31,42	172.980	5.505,41
Kecamatan	127,78	725.314	5.676,27

Sumber: BPS Kota Denpasar (2021)

Berdasarkan kelompok usia, sekitar 24% atau 175.113 orang tergolong dalam kelompok populasi berusia 15–29 tahun atau kategori pemuda. Perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kelompok-kelompok usia 15–29 tahun ini kecil, yaitu 50,8% dan 49,2%.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Usia 15–29 Tahun**

Kelompok usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15–19	29.390	27.519	56.909
20–24	30.108	29.393	59.501
25–29	29.500	29.203	58.703
Jumlah (15–29)	88.998	86.115	175.113
Jumlah penduduk	366.301	359.013	725.314

Sumber: BPS Kota Denpasar (2021)

Kabupaten Badung terdiri atas enam kecamatan, yaitu Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. Luas wilayah kabupaten ini adalah 418,52 kilometer persegi dan jumlah penduduknya adalah 548.191 jiwa pada 2020. Jumlah organisasi kepemudaannya telah berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 62 organisasi kepemudaan pada 2018–2020, 67 pada 2016–2017, 62 pada 2015, dan 69 pada 2011–2014<sup>2</sup>.

Kabupaten Gianyar terdiri atas tujuh kecamatan, yaitu Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tampaksiring, Ubud, Tegallalang, dan Payangan, dengan luas wilayah sebesar 368 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebesar 516.300 jiwa pada 2020.

### 2.3.2 Kota Makassar dan Sekitarnya

Responden di Kota Makassar mencakup responden yang berasal dari Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kota Makassar sendiri terdiri atas 15 kecamatan. Berdasarkan tabel di bawah ini, luas wilayah Kota Makassar adalah 175,77 kilometer persegi, dan kepadatan penduduknya mencapai 8.100,80 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Makassar adalah kecamatan paling padat di Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 32.566,27 jiwa per kilometer persegi (Tabel 5).

**Tabel 5. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan**

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
Mariso	1,82	57.426	31.552,75
Mamajang	2,25	56.049	24.910,67
Tamalate	20,21	180.824	8.947,25
Rappocini	9,23	144.587	15.664,90
Makassar	2,52	82.067	32.566,27
Ujung Pandang	2,63	24.526	9.325,48
Wajo	1,99	29.972	15.061,31
Bontoala	2,10	54.996	26.188,57
Ujung Tanah	4,40	35.789	8.133,86
Kep. Sangkarrang	1,54	14.125	9.172,08
Tallo	5,83	144.977	24.867,41
Panakkukang	17,05	139.590	8.187,01
Manggala	24,14	146.724	6.078,01
Biringkanaya	48,22	209.048	4.335,30
Tamalanrea	31,84	103.770	3.259,11
Jumlah	175,77	1.423.877	8.100,80

Sumber: BPS Kota Makassar (2021)

<sup>2</sup>BPS Kabupaten Badung (2021).

Berdasarkan kelompok usia, sekitar 27% atau 389.588 penduduk Kota Makassar tergolong dalam kelompok usia 15–29 tahun atau kategori pemuda. Perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok-kelompok usia 15–29 tahun ini kecil, yaitu 51,2% dan 48,8%.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kelompok Usia 15–29 Tahun**

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15–19	66.916	62.968	129.884
20–24	67.119	63.547	130.666
25–29	65.260	63.778	129.038
Jumlah (15-29)	199.295	190.293	389.588
Jumlah penduduk	709.060	714.817	1.423.877

Sumber: BPS Kota Makassar (2021)

Latar belakang pemuda di Kota Makassar sangat beragam karena Kota Makassar menjadi daerah tujuan bagi pemuda dari wilayah sekitarnya yang ingin melanjutkan pendidikan di Kota Makassar. Mereka berasal dari daerah dan kelompok suku di sekitar Kota Makassar, seperti Mandar, Toraja, Bugis, dan Makassar. Oleh karena itu, kegiatan kepemudaan di Kota Makassar umumnya dilakukan oleh pelajar SMP/SMA atau mahasiswa di sekolah atau kampus.

Kabupaten Gowa memiliki 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Sombaupu, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu, dengan luas wilayah sebesar 1.883,33 kilometer persegi dan jumlah penduduk 765.836 jiwa pada 2020.

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kelompok Usia 15–29 Tahun**

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15–19	34.433	32.757	67.190
20–24	35.148	33.549	68.697
25–29	33.363	33.522	66.885
Jumlah (15-29)	102.994	99.828	202.772
Jumlah populasi	379.874	385.962	765.836

Sumber: BPS Kabupaten Gowa (2021)

Berdasarkan kelompok usia, sekitar 26,5% atau 202.772 orang tergolong dalam kelompok populasi usia 15–29 atau kategori pemuda. Perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kelompok-kelompok usia 15–29 tahun ini kecil, yaitu 50,77% dan 49,23%.

Mengingat lokasinya yang dekat dengan Kota Makassar, situasi di Kabupaten Gowa serupa dengan Kota Makassar. Yang berbeda hanyalah buruknya akses di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bontonompo, Tinggimoncong, dan Biringbulu. Pemuda di Kabupaten Gowa dapat dengan mudah mengakses kegiatan atau perkembangan komunitas di Kota Makassar. Jadi, tidak mengherankan apabila sebagian warga masyarakat di Kota Makassar berasal dari Kabupaten Gowa.

# III. Partisipasi Sipil

## 3.1 Definisi Partisipasi Sipil

Keterlibatan atau partisipasi sipil memiliki beragam definisi dan arti. Sebagian penulis mendefinisikan keterlibatan sipil sebagai Tindakan kewarganegaraan, baik secara berkelompok atau sendiri-sendiri. Sebagai contoh, Adler dan Goggin (2005) mendefinisikan keterlibatan sipil sebagai partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kondisi bagi sesama warga masyarakat atau untuk membantu membentuk masa depan masyarakat. Sebagian penulis lain memberi penekanan lebih besar pada tindakan kolektif, seperti gerakan atau inisiatif kolektif yang berhubungan dengan isu publik tertentu.

Checkoway dan Aldana (2013) secara longgar mendefinisikan keterlibatan sipil sebagai kondisi ketika orang-orang berkumpul dan mengambil tindakan mengenai isu yang menjadi perhatian masyarakat. Definisi keterlibatan sipil juga menekankan beragam isu atau masalah, yang sebagian besarnya adalah isu dan masalah sosial dan politik. Ekman dan Amna (2012) mencoba mengakomodasi berbagai isu dalam kerangka definisi mereka, tetapi tetap memberi penekanan pada ranah politik dalam konsep dasarnya. Oleh karena itu, keterlibatan atau partisipasi sipil sering kali berkaitan erat dengan partisipasi politik. Berdasarkan temuan mereka, Pontes, Henn, dan Griffith (2018) menyimpulkan bahwa orang berpartisipasi politik apabila dia: memiliki ketertarikan terhadap, memperhatikan, memiliki pengetahuan atau pendapat mengenai, memiliki kesadaran akan, bersikap proaktif terhadap, dan selalu mengikuti perkembangan, politik. Dalam hal ini, sebagian penulis, misalnya Putnam (2000), secara longgar mendefinisikan partisipasi sipil atau politik agar dapat menangkap beragam bentuk partisipasi. Putnam memasukkan banyak bentuk partisipasi yang berhubungan dengan masalah sosial dan politik, antara ranah public dan pribadi, misalnya, mulai dari membaca artikel surat kabar mengenai isu-isu publik hingga memberikan suara dalam pemilu.

Disebabkan beragamnya interpretasi keterlibatan atau partisipasi sipil ini, bentuk-bentuk keterlibatan atau partisipasi sipil sebagai sebuah spektrum pun dapat muncul dalam bentuk beragam tindakan atau ketiadaan tindakan. Sebagai contoh, Ekman dan Amna (2012) mengembangkan kerangka definisi mereka yang menyertakan bentuk-bentuk "ketidakterlibatan" (*disengagement*). Beberapa penulis lain juga memandang keterlibatan sipil tidak hanya dari tindakan (perilaku), tetapi juga dimulai dari tingkatan ide, misalnya tingkat pemahaman atau menunjukkan perhatian. Dalam konteks penelitian ini, kami akan lebih berfokus pada sisi perilaku keterlibatan aktif dengan mempertimbangkan operasionalisasinya. Dengan demikian, istilah partisipasi sipil pun menjadi lebih sesuai.

Setidaknya ada tiga komponen utama yang dapat diidentifikasi dari beragam definisi partisipasi sipil (Checkoway dan Aldana 2013; Cho, Byrne, dan Pelter, 2020; Van Deth 2014; Ekman dan Amna 2012; Mirazchiyski, Caro, dan Sandoval-Hernández 2014; Pontes, Henn, dan Griffiths 2018; Shaw et al. 2014; Voicu dan Voicu 2016):

- 1 Ranah publik;
- 2 Bentuk kegiatan/tindakannya; dan
- 3 Tujuan/sasaran dari kegiatan/tindakannya.

Pertama, ranah publik merujuk pada sifat partisipasi sipil yang terkait erat dengan isu-isu atau masalah publik. Perbedaan lain antarliteratur dapat ditemukan pada fokus dari ranah publik itu sendiri, yang mencakup terutama fokus pada politik, kehidupan bermasyarakat, kewarganegaraan, atau lainnya. Ranah publik ini adalah komponen penting untuk membatasi konteks partisipasi sipil dari bentuk-bentuk kegiatan atau keterlibatan sipil lainnya, misalnya kegiatan sosial informal/pribadi (misalnya, Putnam, 2000). Kedua, bentuk partisipasi sipil umumnya dikatakan sebagai tindakan individu dan/atau tindakan kolektif/kelompok. Ketiga, tujuan atau sasaran dari partisipasi sipil biasanya berkisar seputar upaya perbaikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan secara umum, dan pengaruh politik.

Poin ketiga di atas sangat penting karena poin ini menentukan lebih lanjut bentuk-bentuk partisipasi sesuai tujuan akhirnya. Pengaruh politik, seperti intervensi dalam proses pengambilan keputusan politik, mobilisasi massa, dan partisipasi dalam proses pemilihan umum, berkaitan lebih erat dan dibangun sebagai sebuah konsep dalam partisipasi politik. Meski demikian, peran penting konsep ini yang berkaitan dengan partisipasi dalam perbaikan masyarakat atau kesejahteraan secara umum meniscayakan adanya bentuk partisipasi politik tertentu yang relevan dengan partisipasi sipil. Dapat pula dikatakan bahwa pengaruh politik adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang mencakup perbaikan masyarakat lebih lanjut dalam spektrum tadi, sebagai tujuan dalam konsep partisipasi politik dan sipil.

Oleh karena itu, untuk konteks penelitian ini, partisipasi sipil secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan atau ketertarikan terhadap isu-isu publik, secara individu atau kolektif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/kelompok. Kerangka definisi ini sejalan dengan kerangka keterlibatan sipil versi UNICEF (Cho, Byrne, dan Pelter, 2020). Ketertarikan disertakan untuk menangkap nuansa partisipasi dalam ide kerangka tersebut, misalnya terkait kesadaran. Walau demikian, dalam operasionalisasinya, kami akan lebih berfokus pada "tindakan" atau perilaku. Isu-isu publik dalam konteks ini mengacu pada masalah di tingkat kelompok/lingkungan/kolektif, di luar isu/masalah domestik/rumah tangga, atau dengan kata lain, pada ranah publik. Sebagai contoh, berdonasi untuk tujuan sosial menjadi salah satu cara bagi sebagian orang untuk turut menyelesaikan isu/masalah di tingkat kelompok/masyarakat.

## 3.2 Struktur dan Tipologi Partisipasi Sipil

Tipologi partisipasi sipil, seperti aspek/dimensi/variabelnya, lebih beragam daripada definisinya. Tipologi ini dipahami sebagai suatu spektrum, tahapan, atau rangkaian kategori perilaku partisipasi sipil. Sebagian penulis berfokus pada ranah politik dari dimensi partisipasi sipil mengingat konsep keterlibatan sipil seringkali bersinggungan dengan partisipasi atau keterlibatan politik. Sebagai contoh, Ekman dan Amna (2012) mengembangkan tipologi mereka untuk membedakan partisipasi politik dari keterlibatan sipil melalui dua kategori utama, yaitu partisipasi politik nyata (*manifest*) dan partisipasi

politik laten. Dalam hal ini, keterlibatan sipil tercakup dalam partisipasi politik laten karena menurut argumen mereka, keterlibatan ini tidak bersifat politis secara langsung dalam konteks tindakan parlementer dan ekstraparlementer.

Para penulis pada umumnya menggabungkan ranah sosial atau masyarakat dan ranah politik ketika membahas dimensi/variabel partisipasi sipil (Adler dan Goggin, 2005; Ballard et al., 2015; Banaji dan Buckingham, 2013; Berger, 2009; Checkoway dan Aldana, 2013; Milošević-Đorđević dan Žeželj, 2017; Mirazchiyski, Caro, dan Sandoval-Hernández, 2014; Pontes, Henn, dan Griffiths, 2018; Shaw et al., 2014). Dalam hal ini, partisipasi biasanya berbentuk pengabdian masyarakat, aksi sukarelawan, ekspresi politik, dan aksi politik. Di sisi lain, beberapa nuansa lain masih perlu dikaji lebih lanjut. Salah satunya adalah antara partisipasi wajib atau 'paksa' dan partisipasi berbasis inisiatif. Sebagai contoh, beberapa individu mungkin terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena paksaan sosial/budaya. Keterlibatan dalam proses politik (misalnya, memberikan suara dalam pemilu) juga bisa menjadi kegiatan wajib atau didorong terutama oleh rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan keberagaman dimensi partisipasi sipil dan juga dengan mempertimbangkan nuansanya, kami membagi partisipasi sipil menjadi tiga variabel:

- 1 Partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi;
- 2 Partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/panggilan tugas/kewajiban; dan
- 3 Partisipasi berbasis kelompok.

Partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi merujuk pada kegiatan/tindakan sipil berdasarkan dorongan pribadi, misalnya menjadi sukarelawan, mengangkat persoalan publik di media sosial, atau mempraktikkan perilaku konsumsi beretika. Partisipasi yang didorong oleh rasa tanggung jawab/panggilan tugas/kewajiban terdiri atas kegiatan/tindakan sipil di lingkup masyarakat atau kelompok ketika keterlibatan ini didorong oleh latar sosial/budaya/kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di desa karena diwajibkan oleh tokoh budaya setempat. Partisipasi berbasis kelompok merujuk secara spesifik pada keterlibatan dalam masyarakat atau kelompok yang menyelenggarakan kegiatan sipil. Perbedaannya dengan beberapa kegiatan yang melibatkan latar kelompok dalam partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi adalah variabel ini berfokus pada (i) keanggotaan dalam kelompok noninsidental, dan (ii) tindakan menginisiasi kelompok atau memobilisasi orang lain. Kelompok insidental merujuk pada kelompok *ad hoc* atau kelompok yang dibatasi oleh waktu, misalnya gerakan pengumpulan dana satu waktu.

Ringkasnya, berdasarkan tinjauan literatur, kami menyintesis konteks partisipasi sipil yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

**Tabel 8. Definisi dan Tipologi Partisipasi Sipil Pemuda**

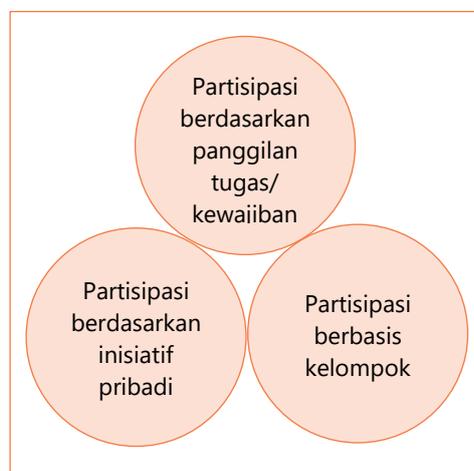
Definisi:  
Tindakan atau ketertarikan pada isu-isu publik, secara sendiri-sendiri atau kolektif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/kelompok.

Variabel 1: Partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi	Variabel 2: Partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/panggilan tugas/kewajiban	Variabel 3: Partisipasi berbasis kelompok
<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi beretika</li> <li>- Menandatangani petisi dalam jaringan (daring)</li> <li>- Menjadi sukarelawan sosial</li> <li>- Menulis artikel mengenai isu tertentu di platform media sosial/berita/publik</li> <li>- Abstain dalam pemilu</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan suara dalam pemilu</li> <li>- Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti desa karena diwajibkan oleh tokoh budaya</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi anggota partai politik</li> <li>- Menjadi anggota kelompok advokasi akar rumput</li> <li>- Menginisiasi organisasi sosial atau politik</li> <li>- Memobilisasi unjuk rasa/demonstrasi</li> <li>- Memobilisasi kampanye sosial/politik di internet</li> </ul>

Sumber: Analisis berdasarkan tinjauan literatur

Kami juga dapat memvisualisasikan struktur partisipasi sipil dengan diagram untuk melihat hubungan antarvariabel dan konsentrasi variabel-variabel partisipasi berdasarkan temuan. Hubungan tersebut digambarkan dengan titik temu tiap lingkaran. Konsentrasi variabel-variabel partisipasi digambarkan dengan luas lingkaran. Beberapa model lain juga digunakan untuk menangkap konsep dan pola partisipasi, misalnya tangga partisipasi (Arnstein 1969) dan segitiga partisipasi (Jans dan Backer 2010), yang menekankan pada fokus konsep yang berbeda. Diagram untuk penelitian ini terutama bertujuan memvisualisasikan pola dan belum bisa disebut sebagai model untuk pengukuran, sebagaimana dapat kita lihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Diagram partisipasi sipil pemuda**



Sumber: Analisis

### 3.3 Partisipasi Sipil dan Bahasa Daerah

Keterkaitan antara partisipasi sipil dan bahasa daerah seperti yang digunakan pada situs BASAbali/BASAibu Wiki dapat dilihat melalui hubungan antara kebudayaan dan pembangunan. Kebudayaan dilestarikan sebagai bagian dari kemanusiaan dan lingkungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat menjadi sarana pemenuhan kebutuhan lain, dan oleh karenanya kebudayaan menjalankan fungsi untuk kebutuhan lain. Pandangan kebudayaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan lain ini merupakan pendekatan fungsionalisme terhadap kebudayaan dan pembangunan sebagai kerangka kerja umum dalam melihat potensi hubungan partisipasi sipil dan bahasa daerah. Oleh karena itu, walau bahasa daerah terpelihara karena digunakan dalam ranah publik (ekosistemis/struktural), bahasa daerah dalam konteks ini dapat pula berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi isu/masalah publik (fungsional).

Pendekatan fungsionalisme terhadap kebudayaan dapat dirunut ke Herskovits (1964) dan Malinowski (1945, 1960) dan dikembangkan lebih lanjut sebagai fungsionalisme struktural melalui Radcliffe-Brown (1952). Herskovits berargumen bahwa kebudayaan mencakup semua elemen kematangan dewasa manusia yang dia dapatkan dari kelompoknya melalui pembelajaran secara sadar atau melalui proses pengondisian, misalnya berbagai teknik dengan segala jenisnya, dan lain-lain (Herskovits 1964, 119), yang dengan sendirinya sudah berupa sarana yang sudah berfungsi. Malinowski mengatakan kebudayaan adalah realitas instrumental. Lebih lanjut, terdapat empat kebutuhan turunan/mendesak dari kemilikan atas budaya, yaitu kebutuhan ekonomi, normatif, pengorganisasian kekuatan, serta mekanisme dan keagenan pendidikan (Malinowski 1945, 44–45).

Isu-isu peningkatan berbasis pembangunan dan masyarakat ataupun kesejahteraan umum berhubungan dengan kebutuhan, sebagaimana diargumentasikan oleh Malinowski. Oleh karenanya, partisipasi sipil dalam arti partisipasi dalam isu-isu publik menuju peningkatan kesejahteraan juga menjalankan fungsi tersebut. Ditambah dengan penggunaan bahasa daerah, kebudayaan dalam konteks ini kemudian dipandang sebagai bagian dari instrumen untuk pembangunan, sebagaimana dinyatakan oleh para penganjur fungsionalisme. Dengan kata lain, pekerjaan umum yang digunakan di sini bukan hanya soal pembangunan kebudayaan (menggunakan/melestarikan bahasa daerah), tetapi lebih utamanya soal kebudayaan untuk pembangunan.

# IV. Temuan Partisipasi Sipil Pemuda: Kota Denpasar dan Sekitarnya

## 4.1 Bentuk Partisipasi Sipil Pemuda

Bentuk partisipasi sipil menurut responden pemuda secara umum lebih berkaitan dengan kegiatan dan/atau keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Responden cenderung menyebutkan kegiatan-kegiatan seperti menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungannya, dan berpartisipasi dalam organisasi lokal. Dalam hal ini, responden sering kali mengasosiasikan rasa tanggung jawab/kewajiban/rasa memiliki ketika menyebutkan alasan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, berpartisipasi dalam organisasi lokal atau menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Berpartisipasi dalam organisasi lokal di tingkat masyarakat, misalnya STT (*Seka Teruna Teruni*), sering disebut oleh sebagian besar responden.

Berkelindannya rasa tanggung jawab/kewajiban dan partisipasi berbasis kelompok sangat mencolok. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa partisipasi berbasis kelompok yang mereka ikuti adalah dengan menjadi anggota STT di dusun (*Banjar*) dan desa mereka. Mereka juga mengatakan bahwa pemuda Bali di desa-desa tradisional wajib menjadi anggota dan berpartisipasi dalam kegiatan STT. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, ada sekitar 400 STT di Kota Denpasar, yang tersebar di semua *Banjar* (tingkat administrasi terkecil di desa tradisional Bali) di Kota Denpasar.

Berpartisipasi dalam STT bagi pemuda menjadi norma sosial dan mereka yang tidak berpartisipasi bisa mendapat sanksi sosial tertentu, misalnya dikucilkan dari lingkaran sosial di masyarakat. Di beberapa desa, orang yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan atau kegiatan STT dikenakan denda. Pejabat pemerintah setempat juga menyebutkan bahwa pemuda yang sudah berusia 16-17 tahun harus menjadi bagian dari STT di *Banjar* mereka. Tidak ada hukuman resmi bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam STT, tetapi mereka biasanya akan mendapat sanksi sosial, misalnya dikucilkan, tidak diundang ke pertemuan sosial, dan dipergunjingkan orang lain.

Kalau tidak ikut kegiatan, ada denda yang harus dibayar. (Responden pemuda, laki-laki, 19 tahun, Kabupaten Badung, 31 Maret 2021)

Di Bali, pemuda "Banjar" harus bergabung dengan STT ... Tidak ada aturan yang menghukum mereka yang tidak berpartisipasi, tetapi biasanya mereka akan dikucilkan oleh teman-teman sebayanya, jadi, ada sanksi sosial. (Pejabat pemerintah setempat, Kota Denpasar, 5 April 2021)

Di sisi lain, sebagian responden juga menyebutkan bahwa kewajiban berpartisipasi dalam STT memang diperlukan. Mengingat karakter Bali adalah budayanya yang kuat dan sebagian besar kegiatan STT didasari oleh ajaran agama Hindu untuk saling membantu sesama, para pemuda pun sudah memiliki rasa keterikatan untuk berpartisipasi dalam

kegiatan-kegiatan STT. Mereka juga mengatakan bahwa menjadi bagian dari STT adalah kebutuhan karena mereka adalah bagian dari masyarakat tempat setidaknya saling membantu sesama menjadi nilai yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan.

... *Tat Twam Asi*, yang artinya kamu adalah saya, saya adalah kamu. Sekarang kita membantu orang lain, nanti kalau kita ada acara, orang lain akan datang membantu. Seperti hubungan timbal balik, jadi ini memang perlu dilakukan. (Responden pemuda, laki-laki, 20 tahun, Kota Denpasar, 30 Maret 2021)

Selain berpartisipasi dalam STT, responden juga menyebutkan beberapa bentuk partisipasi lain berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban, termasuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, berpartisipasi dalam kerja bakti, dan *ngayah*. *Ngayah* adalah kegiatan individu atau kelompok saat orang-orang bekerja tanpa mengharapkan imbalan materi. Masyarakat Bali berpartisipasi dalam *ngayah* biasanya saat memulai atau mengakhiri kegiatan di Pura atau kediaman keluarga bangsawan atau *Griya* (kediaman pendeta). Sebagian besar responden mengatakan bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara (rasa memiliki negara), sementara berpartisipasi dalam kerja bakti dan *ngayah* adalah bagian dari tanggung jawab sebagai anggota pemuda Bali atau bagian dari masyarakat atau budaya Bali. Oleh karena itu, dalam konteks ini, sebagian partisipasi sipil responden lebih didorong oleh kesadaran identitas, yang pada gilirannya membangun rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, budaya dan adat Bali, serta negara.

Kesadaran identitas ini sedikit berbeda dari partisipasi dalam STT, yang mencakup beberapa bentuk "hukuman sosial" atau tekanan, tetapi sebagian responden tetap memandangnya melalui kaca mata kesadaran identitas. Walau demikian, *ngayah* juga memiliki bentuk tekanan sosial, seperti halnya partisipasi dalam STT, karena *ngayah* pada dasarnya adalah bentuk gotong royong yang dilakukan pemuda atau keluarga. Mengingat *ngayah* juga terkait erat dengan kegiatan keagamaan, sebagian besar responden mengatakan bahwa *ngayah* setidaknya adalah bagian dari adat dan hampir semua orang melakukannya.

Kalau ada pemuda yang jarang ikut *ngayah* atau *mebraja*, diskriminasinya akan jelas terlihat. Para pemuda lain tidak akan mau membantu atau menghadiri upacara apabila pemuda yang jarang ikut *ngayah*/*mebraja* ini menggelar acara tradisional. Bisa dibayangkan dia menerima sanksi sosial dari para pemuda. (Responden pemuda, perempuan, 21 tahun, Kabupaten Gianyar, 30 Maret 2021)

Tidak banyak perbedaan ditemukan pada partisipasi sipil laki-laki dan perempuan. Partisipasi responden perempuan dalam inisiatif pribadi lebih sedikit, tetapi tidak ada perbedaan pola yang signifikan dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini sesuai dengan informasi dari pejabat pemerintah daerah dan akademisi lokal yang menunjukkan tidak adanya perbedaan berarti antara partisipasi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, dalam satu kegiatan yang sama, perbedaan tampak dalam hal peran dan kontribusi peserta. Sebagai contoh, dalam *ngayah*, laki-laki biasanya mengurus semua hal terkait fasilitas dan kegiatan ritual, sementara perempuan menyiapkan sesajen untuk kegiatan ritual itu. Salah satu akademisi lokal mengatakan bahwa hal ini terutama terlihat di luar wilayah perkotaan. Oleh karena itu, nuansa partisipasi sipil pemuda antara perempuan dan

laki-laki bisa dikatakan lebih tampak apabila kita amati proses partisipasinya, alih-alih perbedaan bentuk partisipasinya secara keseluruhan.

Isu gender masih lebih relevan di wilayah perdesaan daripada di wilayah perkotaan. Sebagai contoh, dalam STT, suara laki-laki lebih didengar daripada suara perempuan. (Akademisi lokal, laki-laki, Kota Denpasar, 5 April 2021)

Sejalan dengan latar belakang budaya Bali yang kuat, pemuda juga menunjukkan minat besar terhadap isu-isu budaya dalam kaitannya dengan persepsi mereka terhadap partisipasi sipil pemuda. Secara umum, isu-isu yang disebutkan responden terkait persepsi bentuk partisipasi sipil yang dapat diikuti pemuda cenderung berfokus pada pelestarian budaya dan/atau isu-isu lingkungan tertentu. Sebagian responden mengatakan pemuda perlu berpartisipasi dalam mengampanyekan budaya Bali atau berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan sebagai bagian dari usaha melestarikan budaya. Pemuda di wilayah perkotaan lebih peka terhadap isu-isu lain, seperti kondisi lingkungan dan ekonomi, karena isu-isu ini sangat relevan dan pemuda di wilayah perkotaan lebih terekspos isu-isu ini.

Persepsi terhadap partisipasi dalam inisiatif pelestarian budaya di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar serupa, jika dibandingkan dengan responden pemuda di Kota Denpasar. Di sisi lain, terkait partisipasi aktual, lebih banyak responden di Kota Denpasar yang telah berpartisipasi dalam inisiatif pelestarian budaya atau kegiatan publik lain daripada responden di wilayah Kabupaten Badung dan Gianyar. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya inisiatif atau kegiatan yang dilakukan di Kota Denpasar dibandingkan dengan di Kabupaten Badung dan Gianyar. Hal ini mungkin terkait dengan kondisi umum di wilayah perdesaan dan perkotaan saat ini. Di wilayah perdesaan, kegiatan kepemudaan di luar kegiatan budaya dan keagamaan biasanya terbatas. Sementara itu, di wilayah perkotaan, terutama di Kota Denpasar, ada banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh pemuda.

Untuk partisipasi sipil berdasarkan inisiatif pribadi, responden di Kota Denpasar lebih berkonsentrasi pada jenis partisipasi sipil kampanye sosial. Meski demikian, banyak responden mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukan jenis partisipasi sipil berdasarkan inisiatif pribadi. Bagi mereka, melibatkan diri dalam kampanye sosial, misalnya melalui media sosial, menjadi tindakan terkecil yang dapat dilakukan oleh pemuda terkait isu-isu di masyarakat. Isu-isu yang disebutkan oleh para pemuda dalam konteks ini cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19, pengelolaan keuangan, dan pendidikan. Walau demikian, sebagian besar penekanannya masih pada isu-isu budaya.

Partisipasi sipil para responden masih berfokus pada aktivisme sosial atau partisipasi sosial, dan bukan partisipasi politik, walaupun Ekman dan Amna (2012) mengidentifikasi bentuk partisipasi publik semacam ini sebagai partisipasi politik laten, yakni bentuk partisipasi yang condong kepada ranah politik, berhubungan dengan proses pengambilan keputusan politik, dan melibatkan penggunaan hak pilih. Beberapa responden juga mengatakan mereka melakukan penelusuran calon kepala daerah dan anggota legislatif dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hanya satu responden yang mengatakan bahwa pemuda dapat berpartisipasi dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa dengan menyumbangkan saran atau ide. Mengenai proses pengambilan

keputusan di tingkat desa, responden lain menyebutkan ikut aktif dalam pelaksanaan ide/program dengan cara berpartisipasi dalam program-program desa.

Satu pola lain yang mencolok terkait partisipasi sipil berbasiskan inisiatif pribadi adalah bahwa responden nonmahasiswa lebih cenderung memulai inisiatif/gerakan daripada responden mahasiswa. Responden nonmahasiswa yang dimaksud di sini adalah responden pemuda yang sudah lulus dan saat ini bekerja, termasuk mereka yang berusia di atas 24 atau 25 tahun. Jika responden mahasiswa lebih berkonsentrasi pada kampanye sosial, bentuk partisipasi responden nonmahasiswa lebih beragam, termasuk memberi bimbingan belajar pada siswa di lingkungan mereka dan membantu memasarkan produk lokal atau sekadar mengonsumsi produk lokal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa responden yang sudah bekerja sampai taraf tertentu lebih terlibat dalam partisipasi publik. Namun, perlu dicatat bahwa dalam studi ini jumlah responden nonmahasiswa lebih kecil, dibandingkan responden mahasiswa.

Sebagaimana dinyatakan di atas, pandemi memengaruhi partisipasi sipil pemuda di Bali. Namun, tidak hanya pada tindakan yang telah dilakukan oleh responden, pandemi juga secara signifikan memengaruhi konteks persepsi partisipasi sipil pemuda, terutama bagaimana persepsi mereka terhadap tindakan/kegiatan yang dapat mereka lakukan terkait isu-isu publik. Salah satu isu yang disebutkan oleh responden adalah tentang pencegahan penyebaran COVID-19 atau penegakan protokol kesehatan. Responden berpendapat bahwa di masa sulit dan situasi seperti saat ini, pemuda dapat berpartisipasi dengan menjaga agar informasi yang salah tidak tersebar dan membantu mengedukasi publik mengenai pentingnya secara terus menerus mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Sebagian responden juga mengatakan bahwa mereka telah menjalankan peran mereka dalam menyebarkan informasi dan membagikan informasi melalui media sosial dan mengawal penyebaran informasi di lingkungan atau keluarga mereka.

Sekarang opini publik di media sosial cukup negatif. Misalnya, mengenai vaksin corona. Ada banyak opini negatif mengenai vaksin corona. Sebagai contoh, katanya vaksin yang digunakan tidak bagus, jadi, banyak yang tidak mau divaksinasi karena takut. Sekarang, kita bisa menjangkau lebih banyak orang secara daring; kita dapat memberikan bimbingan daring mengenai pentingnya vaksinasi agar masyarakat tidak lagi takut. (Responden pemuda, perempuan, 23 tahun, 2 April 2021)

Secara keseluruhan, pola-pola partisipasi ini menunjukkan bahwa pemuda perkotaan Bali pada umumnya aktif dalam partisipasi sipil, tetapi lingkup dan tingkat partisipasi mereka terbatas: sebagian besar kegiatan dilakukan pada tingkat masyarakat dan sebagian besar menyangkut isu-isu budaya.

Perbedaan-perbedaan kecil lanjutan yang dapat ditangkap menunjukkan bahwa cakupan dan tingkat partisipasi saat ini terutama didorong oleh rasa tanggung jawab/kewajiban/tekanan sosial dan kurang bersifat politis. Temuan yang mengindikasikan bahwa responden lebih fokus pada aktivisme sosial, alih-alih partisipasi politik, sesuai dengan temuan umum yang mengindikasikan bahwa pemuda di Bali lebih terlibat di dalam isu-isu budaya, keagamaan, dan identitas. Perubahan mencolok terjadi di antara pemuda perkotaan di Bali selama bertahun-tahun, terutama setelah gerakan reformasi, yang membuat pemuda lebih terpapar, dan lebih terlibat dalam, isu-isu publik lain. Poin-

poin ini akan dijelaskan secara lebih mendalam pada 4.2 Faktor dan Aktor yang Berpengaruh dalam Partisipasi Sipil Pemuda.

## Gambar 2. Partisipasi sipil pemuda di Bali

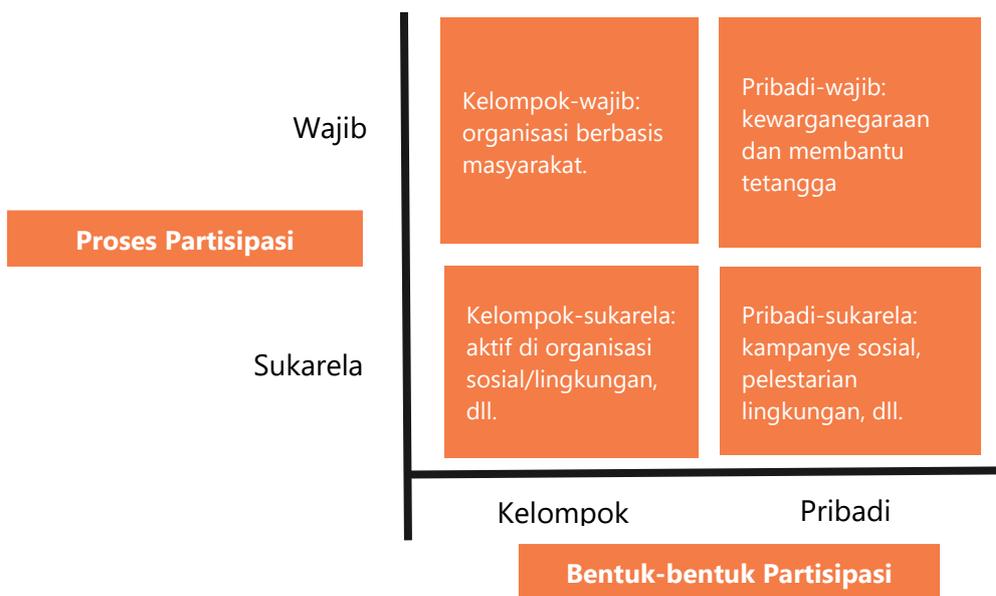


Sumber: Analisis pengumpulan data, 2021.

Merujuk kembali pada struktur partisipasi yang digunakan dalam studi ini, partisipasi sipil pemuda di Bali saat ini dapat dilihat pada Gambar 2. Partisipasi mereka terutama berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban. Temuan ini berasal bukan hanya dari jumlah responden, tetapi juga dari penekanan yang mereka berikan pada rasa tanggung jawab/kewajiban ini. Dalam hal ini, karena sebagian besar kegiatan berhubungan dengan keterlibatan pemuda dalam organisasi masyarakat setempat, misalnya STT, partisipasi mereka pun terutama didorong oleh rasa tanggung jawab/kewajiban dan berhubungan erat dengan partisipasi berbasis kelompok mereka. Oleh karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2, partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban lebih besar daripada dua bentuk partisipasi yang lain disebabkan oleh konsentrasi dari partisipasi itu sendiri. Hubungannya dengan partisipasi berbasis kelompok terutama ada pada bagaimana partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban juga mendorong partisipasi berbasis kelompok. Partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi lebih beragam, tetapi frekuensinya lebih kecil daripada dua jenis partisipasi lainnya. Secara keseluruhan, tidak ada persinggungan langsung antara partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi dengan dua jenis partisipasi lainnya. Diperlukan penelitian lebih jauh mengenai dinamika yang lebih terperinci antarbentuk partisipasi sipil karena sangat mungkin setiap variabel partisipasi berhubungan dengan atau memengaruhi variabel partisipasi lain.

Agar dapat melihat bentuk-bentuk partisipasi secara lebih mendetail, kami menyusun kembali data menjadi empat kategori: (i) pribadi-wajib, (ii) pribadi-sukarela, (iii) kelompok-wajib, dan (iv) kelompok-sukarela. Melalui empat kategori ini, kita bisa melihat dengan lebih jelas bentuk partisipasi mana yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab/kewajiban dan partisipasi mana yang dilakukan secara sukarela atau berdasarkan inisiatif pribadi/kolektif. Kita dapat memahami aspek pribadi dan kelompok sebagai bentuk partisipasi, dan aspek kewajiban dan sukarela sebagai bagian dari proses partisipasi. Matriks empat kategori ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 3. Bentuk dan proses partisipasi sipil pemuda**



Sumber: Analisis pengumpulan data, 2021.

Berdasarkan pengelompokan ini, beberapa bentuk partisipasi dapat diidentifikasi sebagai partisipasi pribadi-wajib, yaitu persinggungan antara bentuk partisipasi pribadi dengan partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban. Partisipasi yang teridentifikasi mencakup menggunakan hak pilih dalam pemilu, membantu tetangga, dan mematuhi hukum. Semua bentuk partisipasi yang teridentifikasi pada tiap kategori dapat dilihat pada Lampiran 1. Membantu tetangga masih erat kaitannya dengan keyakinan penganut agama Hindu tentang hubungan timbal balik, sedikit berbeda dengan dua bentuk partisipasi lain yang lebih dekat dengan partisipasi berbasis kewarganegaraan. Dalam hal ini, menggunakan hak pilih dalam pemilu lebih sering disebutkan oleh responden.

Kita juga bisa melihat bahwa dalam hal variasi bentuk partisipasi, partisipasi pribadi-sukarela lebih beragam dibandingkan dengan kategori lain. Dalam hal ini, perbedaan utamanya dibandingkan partisipasi wajib (misalnya menjadi anggota STT atau mengikuti *Ngayah*) adalah konsentrasi responden yang berpartisipasi. Sebagaimana telah dinyatakan dan ditunjukkan pada Gambar 2, partisipasi responden terkonsentrasi pada partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah semua partisipasi wajib pribadi maupun kolektif. Sebaliknya, bentuk partisipasi pribadi-sukarela lebih tersebar, sehingga lebih bervariasi. Hal ini terjadi karena tiap-tiap bentuk partisipasi sering kali tidak dilakukan oleh responden lain yang sudah melakukan partisipasi pribadi-sukarela. Dengan kata lain, bentuk partisipasi yang dilakukan setiap responden biasanya berbeda satu sama lain. Bentuk partisipasi yang paling sering dilakukan oleh banyak responden adalah melakukan kampanye sosial/mengedukasi publik.

## 4.2 Faktor dan Aktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Sipil Pemuda

Dua faktor memengaruhi pola dan bentuk partisipasi sipil pemuda di Bali, terutama di wilayah perkotaan: faktor intrinsik (dari responden itu sendiri) dan faktor eksternal (konteks dan dinamika sosial-politik). Faktor eksternal memengaruhi kondisi partisipasi sipil kaum muda di Bali saat ini, dan secara umum dirasakan oleh banyak responden. Faktor intrinsik bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang dapat diintervensi dan faktor-faktor ini dapat bertindak sebagai pendorong atau justru penghambat bagi partisipasi sipil.

Faktor intrinsik yang disebutkan oleh responden terutama adalah kurang rasa percaya diri dan ketakutan akan mendapatkan balasan. Kedua faktor ini biasanya memengaruhi perilaku responden dalam menyuarakan keprihatinan/opini atas isu-isu publik atau dalam berpartisipasi dalam kampanye sosial. Ketakutan akan mendapatkan balasan secara lebih spesifik terkait dengan partisipasi daring, misalnya dengan menyuarakan atau berkampanye mengenai isu-isu publik di media sosial. Sebagian responden mengatakan mereka takut mendapatkan balasan dari pengguna lain dan/atau terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>3</sup> yang problematik. Terkait kurangnya rasa percaya diri, sebagian responden mengatakan bahwa mereka merasa kurang informasi/pengetahuan atau merasa bukan pihak yang tepat untuk membicarakan isu tertentu. Ada kemungkinan para responden ini tetap terlibat dalam bentuk partisipasi tertentu, yaitu partisipasi penuh perhatian (menunjukkan perhatian terhadap isu-isu publik), tetapi hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dan di luar fokus utama dari partisipasi dalam penelitian ini.

Karena saya sering menjumpai hoaks, jadi, jika saya membagikan sesuatu, saya harus tahu lebih dahulu kebenarannya. Jadi, saya tidak berani. (Responden pemuda, perempuan, 22 tahun, 27 Maret 2021)

Saya takut responsnya tidak seperti yang saya harapkan karena sepertinya, berdasarkan pengalaman, pikiran orang mungkin tidak sesuai dengan pikiran saya. Ada orang-orang yang ingin membantu, tetapi mereka dianggap mencari perhatian. Jadi, saya takut, saya ragu. (Responden pemuda, perempuan, 19 tahun, 28 Maret 2021)

Walaupun kurang percaya diri dan takut adanya balasan, sebagian tetap membagikan informasi mengenai isu-isu tertentu yang mereka anggap perlu dibagikan. Di lain pihak, sebagian lainnya masih menjaga jarak dari isu-isu publik. Dengan kata lain, walau sebagian menjaga jarak, mereka tetap tahu isu-isu publik tertentu, tetapi mereka memilih untuk tidak terlibat lebih lanjut. Perbedaan kecil seperti ini penting karena menunjukkan tingkat partisipasi, misalnya ketika seseorang berada dalam "fase" kesadaran dan nantinya mungkin akan lebih melibatkan diri secara langsung. Hal ini juga penting untuk konteks

---

<sup>3</sup>Undang-undang ini menetapkan peraturan transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi (TI). UU ini mencakup peraturan terkait keamanan, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dua isu yang membuat UU ini mendapat sorotan tajam karena adanya dugaan bahwa UU ini digunakan untuk tujuan-tujuan politik dan mengkriminalisasi warga negara (Paath, Dorimulu, dan Kure 2021).

berpartisipasi selain dalam isu-isu di masyarakat mereka, seperti teridentifikasi pada sebagian besar responden.

Tingkat partisipasi dapat diteliti lebih jauh di studi-studi lanjutan untuk mengeksplorasi dinamika antara ketiga variabel partisipasi utama. Temuan saat ini sudah mengindikasikan sebuah bentuk pola relasi yang memengaruhi kegiatan partisipasi pemuda yang berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban/tekanan sosial dan partisipasi berbasis kelompok. Perbedaan lanjutan tingkat atau derajat partisipasi dapat diperluas lebih lanjut agar dapat mengidentifikasi beragam tingkat keterlibatan pemuda antara partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban/tekanan sosial, dan partisipasi berbasis kelompok.

Salah satu jalan yang dapat diambil untuk memengaruhi pemuda, terutama di wilayah perkotaan, agar lebih berpartisipasi aktif adalah melalui partisipasi berbasis kelompok, yaitu keterlibatan aktif dalam organisasi publik atau masyarakat. Sebagian besar responden saat ini hanya terlibat dalam komunitas pelajar, misalnya STT, yang mendasarkan partisipasi pada hobi, olahraga, dan kesenian. Beberapa responden lain juga secara aktif terlibat dalam organisasi yang memiliki fokus lebih luas atau lebih beragam, misalnya fokus pada pendidikan di Bali, pelestarian lingkungan Bali, dan lainnya. Para responden ini dapat dikatakan berkemungkinan lebih besar memperluas partisipasi mereka, khususnya dalam konteks keterlibatan dalam isu-isu publik, di luar isu terkait budaya dan agama.

Pertama, ada kecenderungan responden yang terlibat dalam organisasi masyarakat yang berfokus pada isu-isu publik—seperti pendidikan—juga terlibat di lingkungan mereka dan juga di lingkup yang lebih luas. Sebagian besar responden yang hanya aktif di komunitas mahasiswa di universitas mereka atau komunitas lokal (seperti STT) cenderung terlibat dalam komunitas lokal mereka atau dalam ranah publik yang lebih kecil. Yang dikecualikan dari kecenderungan ini adalah partisipasi dalam isu-isu budaya, seperti mempromosikan usaha pelestarian budaya atau mengampanyekan nilai/produk budaya. Di bidang-bidang ini, pemuda juga lebih mungkin terlibat di tingkat lingkungan dan di lingkup yang lebih luas.

Kedua, berdasarkan pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi dan gerakan pemuda di Bali, masyarakat perkotaan bisa dikatakan telah berperan dalam membuat pemuda lebih terpapar isu-isu yang lebih beragam dan lebih luas. Sebagai pulau pariwisata, Bali dipandang sebagai kawasan yang tidak terlalu politis. Bali memiliki citra sebagai pulau dewata yang harmonis dan hal ini diproyeksikan secara internal maupun eksternal (Bräuchler 2020). Beberapa respons terhadap isu-isu lain tidak bisa dipisahkan dari usaha melestarikan citra harmonis ini, terutama karena sebagian besar masyarakat Bali menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pariwisata dan ada kepentingan kuat di seputar pariwisata (Dwyer 2009). Oleh karena itu, isu-isu di ranah publik sering kali terkonsentrasi pada budaya dan adat istiadat.

Saya lihat masyarakat Bali, terutama generasi muda di Kota Denpasar, sebagian dari mereka sangat responsif terhadap isu-isu publik, tetapi secara umum masyarakat Bali tidak memiliki respons serius terhadap isu-isu publik, kecuali terhadap isu identitas dan agama. (Akademisi lokal, laki-laki, Kota Denpasar, 5 April 2021)

Karena, sebagai orang yang tinggal di Bali, kami terikat oleh tradisi. Setiap aktivitas akan dikaitkan dengan adat istiadat, seperti pemakaman, pernikahan, dan lain-lain. Sebelum kami menggelar kegiatan-kegiatan seremonial ini (sendiri), kami membantu orang lain yang mengadakan acara. Jika tiba giliran kami, orang lain pun akan membantu kami. (Responden pemuda, laki-laki, 24 tahun, Kota Denpasar, 26 Maret 2021)

Selama bertahun-tahun, telah terjadi lonjakan respons yang lebih kuat terhadap isu-isu publik, terutama di wilayah perkotaan, dan juga dipengaruhi oleh gerakan Bali Tolak Reklamasi yang diinisiasi oleh ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Didorong oleh keprihatinan responden terhadap kondisi lingkungan, gerakan ini juga mendapat perhatian di luar Kota Denpasar dan wilayah perkotaan karena isunya yang terkait dengan lingkungan. Gerakan ini juga sejalan dengan pesan dalam agama Hindu, *tri hita karana*, yang mengharuskan keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan (Bräuchler 2020). Gerakan ini adalah salah satu aktivitas sipil paling signifikan yang melibatkan pemuda Bali dan menekankan pentingnya masyarakat dan organisasi publik bagi pemuda untuk lebih aktif terlibat dalam isu dan wacana yang lebih luas. Banyak STT yang akhirnya juga terlibat dalam gerakan ini dan hal ini sangat penting dalam memperluas cakupan isu yang menjadi perhatian STT. "*Yang harus bergerak bukan hanya warga pesisir, tapi semua krama Bali. Perjuangan ini untuk Bali*", adalah salah satu contoh keprihatinan yang disuarakan oleh STT terkait reklamasi yang terekam di media massa (Darmendra, 2016). Sebagai organisasi di tingkat desa/*Banjar*, STT biasanya hanya berfokus pada isu-isu lokal dan budaya. Gerakan Bali Tolak Reklamasi masih berjalan karena mereka tetap menuntut pemerintah pusat membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 yang mengubah status Teluk Benoa menjadi area nonkonservasi, sehingga membuatnya masih menghadapi risiko reklamasi.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan akademisi lokal, partisipasi yang lebih besar di ranah publik oleh pemuda bisa dilihat melalui tiga kelompok: (i) pemuda yang memiliki koneksi dengan pemuda di wilayah lain, (ii) intelektual muda di wilayah perkotaan, (iii) pemuda di komunitas musik *indie* dan *punk rock* (yang memasukkan ke dalam musik mereka materi kampanye sosial dan jargon pergerakan). Pemuda di wilayah perkotaan juga tampak lebih berani mengkritik aparat desa tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun STT masih menjadi kekuatan penting bagi pemuda di Bali, pemuda di Bali mengembangkan keterlibatan mereka dalam ranah publik melalui berbagai ruang publik, dan hal ini dapat mendorong mereka untuk semakin terlibat dalam partisipasi sipil.

STT sendiri bisa dikatakan masih dibatasi dengan fokus khusus pada kebudayaan dan adat istiadat dan dengan bentuk hubungan antara patron dan klien dengan lembaga desa. Oleh karena itu, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian ini, STT adalah bagian penting dari partisipasi sipil pemuda di Bali. Walau demikian, STT masih memiliki keterbatasan dalam menjadi organisasi yang lebih beragam dan mencakup partisipasi yang lebih luas. Hal ini kemudian mendorong sebagian pemuda untuk terlibat dalam organisasi/komunitas lain. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pemuda Bali akan memperluas isu-isu yang menarik perhatian mereka dan jalur lain apa yang akan mereka cari dan gunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi ketakutan mereka dalam mengangkat isu-isu publik.

Biasanya kegiatan Seka Teruna adalah di bidang budaya, adat istiadat, dan kegiatan sosial di desa-desa tradisional. Saya belum pernah melihat Seka Teruna membuat gerakan untuk

menyampaikan sesuatu, untuk menunjukkan sikap kritis, untuk merespons isu-isu publik. Saya rasa mereka belum melakukannya karena mereka masih diberi tugas-tugas tradisional, jadi, kegiatan mereka masih berfokus pada seni dan budaya. (Akademisi lokal, laki-laki, Kota Denpasar, 5 April 2021)

Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden pemuda, ada setidaknya dua faktor yang memengaruhi partisipasi sipil pemuda: (i) pemuda lain dan (ii) aparat desa. Pertama, "pemuda lain" di sini mengacu pada temuan bahwa partisipasi sipil di tingkat komunitas tidak bisa dipisahkan dari tekanan/hukuman sosial dari pemuda lain yang sudah berpartisipasi. Kedua, "aparat desa" juga memengaruhi konteks pemberlakuan tekanan sosial bagi pemuda untuk berpartisipasi di organisasi lokal. Di beberapa daerah, pemuda yang tidak berpartisipasi dikenakan denda, yang jumlahnya biasanya berdasarkan kesepakatan antara STT dan aparat di desa dan *Banjar*. Tidak ditemukan aktor lain yang berpengaruh terhadap pemuda di tingkat yang lebih luas.

Responden pemuda juga menyebutkan beberapa program lain yang memengaruhi partisipasi sipil mereka, terutama dari organisasi nonpemerintah (ornop), misalnya Bali Muda Foundation, inisiatif pendidikan yang dikenalkan oleh organisasi Swimdo, dan Youth on Top. Program-program ini diketahui hanya memengaruhi pemuda setelah para pemuda tersebut berpartisipasi dalam program mereka. Banyak responden juga mengatakan bahwa organisasi mahasiswa di kampus juga membuka jalan bagi mereka untuk berpartisipasi, walau sebagian besar adalah partisipasi dalam kepanitiaan acara kampus. Selain program-program dari ornop dan komunitas, STT disebutkan sebagai organisasi yang mendorong partisipasi sipil sebagian besar pemuda.

Lembaga pemerintah daerah juga memiliki beberapa program terkait partisipasi sipil pemuda. Ada organisasi pemuda dan beberapa program pemuda di bawah Dinas Kepemudaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Salah satu inisiatif yang disebutkan adalah Widya Pada, yang diinisiasi oleh organisasi kepemudaan di bawah pengawasan pemerintah daerah selama pandemi. Sejalan dengan kecenderungan fokus pada isu budaya, inisiatif ini sekaligus menjadi kampanye dan diskusi publik mengenai seni dan budaya Bali. Namun, tidak ada responden pemuda dalam studi yang mengatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam program ini.

Program partisipasi pemuda dari pemerintah mungkin tidak optimal dalam hal cakupan partisipasinya karena setidaknya sejak 2018, lembaga-lembaga pemerintah daerah yang mengurus masalah kepemudaan belum bisa secara efektif mengimplementasikan program-program mereka. Di satu sisi, hal ini terjadi karena periode 2018–2019 adalah periode transisi pengaturan ulang program pemerintah yang mengalihkan program-program untuk pemuda usia sekolah menengah dan yang lebih dewasa dari tingkat kota ke tingkat provinsi. Dinas Kepemudaan di Kota Denpasar belum mampu mengimplementasikan program-program baru, sementara dinas kepemudaan di tingkat provinsi hanya mampu melanjutkan program yang sebelumnya diinisiasi di tingkat kota.

Selain dinas kepemudaan, dinas-dinas lain juga memiliki program yang menasar pemuda, misalnya program kewirausahaan untuk pemuda yang diinisiasi oleh Badan Kreatif (Bekraf) Kota Denpasar dan acara kebudayaan dari dinas kebudayaan yang melibatkan pemuda. Program-program untuk pemuda yang diinisiasi oleh dinas-dinas di luar dinas kepemudaan ini membantu dinas kepemudaan lebih berfokus pada pekerjaannya. Sebagai

contoh, program kewirausahaan diselenggarakan oleh Bekraf karena program ini, umumnya, adalah bagian dari lingkup tugas Bekraf. Akan tetapi, di saat yang sama, hal ini juga menjadi hambatan dalam usaha koordinasi pemerintah. Koordinasi pemerintah cukup bermasalah selama proses perencanaan karena dinas kepemudaan harus memastikan program kepemudaan mana yang akan diimplementasikan oleh dinas-dinas lain dan program mana yang harus dijalankan oleh dinas kepemudaan.

Oleh karena itu, terkait dengan para aktor yang memengaruhi prosesnya, komunitas atau organisasi sosial setempat dianggap sangat berpengaruh karena diketahui mereka melibatkan secara langsung responden pemuda dalam inisiatif partisipasi sipil. Jadi, komunitas menjadi salah satu penentu dinamika gerakan kepemudaan di Bali. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong partisipasi sipil pemuda. Akan tetapi saat ini, pemerintah daerah menghadapi hambatan operasional. Pengaruh pemerintah lokal saat ini adalah pada program-program yang sudah diimplementasikan, seperti jambore dan acara-acara kebudayaan.

# V. Temuan Partisipasi Sipil Pemuda: Kota Makassar dan Sekitarnya

## 5.1 Bentuk Partisipasi Sipil Pemuda

Salah satu karakteristik perkembangan dan kemandirian sebuah kabupaten adalah partisipasi masyarakatnya—termasuk pemudanya—dalam beragam kegiatan di kabupaten itu. Partisipasi pemuda dalam isu-isu publik adalah bagian sangat penting dalam bermasyarakat. Usaha untuk mendorong partisipasi pemuda dalam isu-isu publik masih menemui kendala dan perlu ditangani karena kabupaten tersebut, dan bahkan negara ini, secara lebih luas, akan menjadi tanggung jawab mereka.

Partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi berkaitan dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau komunitas. Kegiatan ini mencakup partisipasi dalam kegiatan terkait lingkungan, misalnya isu pengelolaan sampah yang tidak tepat, keterlibatan dalam demonstrasi, dan kegiatan advokasi mengenai lingkungan secara lebih luas, pengadaan rumah baca di Malino, penandatanganan petisi secara daring, pengidentifikasian informasi tidak benar, serta sosialisasi mengenai COVID-19 untuk lansia.

Contoh kegiatan yang dilakukan melalui partisipasi berbasis kelompok antara lain menjadi anggota organisasi pelajar/mahasiswa, mengajar bahasa Inggris di Komunitas Pecinta Anak Jalanan, melakukan penyelidikan dari Environmental Media mengenai kondisi sampah, terlibat dalam diskusi di Facebook, menjadi anggota Komunitas Seni Perfilman, menggalang dana untuk korban bencana, menjadi anggota OSIS<sup>4</sup>, BEM<sup>5</sup> atau organisasi lain di kampus, dan melatih anggota Paskibraka<sup>6</sup> dalam persiapan memperingati hari kemerdekaan.

Kegiatan yang termasuk wajib bagi pemuda di Kota Makassar adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu, mengembangkan kapasitas diri di sekolah atau kampus, aktif dalam kegiatan remaja masjid, terlibat aktif di karang taruna, berpartisipasi dalam kerja bakti membersihkan kota, membantu mendistribusikan masker, mempraktikkan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) selama masa pandemi COVID-19, menghargai perbedaan suku, menghormati budaya lain di masyarakat, berpartisipasi

---

<sup>4</sup>OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah organisasi siswa di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Dalam kepengurusannya, ketua OSIS dipilih oleh para siswa di sekolah itu. OSIS menjadi wadah pencapaian prestasi dan keahlian, selain sebagai tempat untuk mengembangkan nilai-nilai organisasi dan pencapaian mufakat. OSIS memiliki pembimbing, biasanya guru yang memiliki keahlian tertentu; pembimbing ini dipilih oleh pihak sekolah.

<sup>5</sup>BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) adalah organisasi mahasiswa intrakampus. BEM adalah lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi.

<sup>6</sup>Paskibraka merupakan kependekan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Tugas utama Paskibraka adalah mengibarkan duplikat bendera pusaka pada saat upacara pengibaran bendera untuk memperingati hari proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

dalam kegiatan memperingati hari kemerdekaan, dan menghadiri seminar tentang kenormalan baru<sup>7</sup>.

Responden di Kota Makassar dan sekitarnya menginisiasi beragam kegiatan dengan prioritas yang berbeda antara satu responden dan yang lain. Sebagai contoh, bagi pecinta lingkungan, mengatasi masalah limbah menjadi prioritas. Sebuah pawai aksi untuk membangkitkan kesadaran akan lingkungan hidup, misalnya, diadakan pada 2020.

... Yang utama adalah lingkungan hidup karena selama ini masalah limbah terus mengalami kemunduran dan kesadaran dari masyarakat juga kurang, sementara di masa mendatang, justru sampah, menurut saya, yang akan merusak Bumi. Jadi, kesadaran kita, sebagai masyarakat, harus dibangun dari sekarang. (Responden pemuda, perempuan, 19 tahun, Kota Makassar, 30 Maret 2021).

Contoh kegiatan partisipasi publik lain yang diinisiasi oleh lembaga lain adalah Duta Edukasi Pelajar, Sekolah Biru Langit, dan *Go Teaching*. Duta Edukasi Pelajar, misalnya, adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan fokusnya adalah mengajari anak-anak di lingkungan setempat.

Responden dalam laporan ini didominasi oleh pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya yang masih bersekolah (SMP atau SMA) dan kuliah (mahasiswa). Sebagian kecil pemuda bekerja sebagai pengusaha atau karyawan. Secara umum, kegiatan responden berpusat pada kegiatan sekolah atau ekstrakurikuler. Berdasarkan tujuan kegiatannya, pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya terlibat dalam berbagai kegiatan agar mereka dapat mengembangkan kapasitas diri, menambah ilmu pengetahuan, atau memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Peningkatan kapasitas dan pengembangan diri menjadi kegiatan rutin dan wajib. Beberapa kegiatan juga berfokus pada isu-isu ilmiah dan pada keinginan pemuda untuk mengembangkan kapasitas mental, spiritual dan sosial mereka. Kegiatan ini dilakukan baik secara formal maupun informal dan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik, dan agama. Contoh kegiatan formal adalah menjadi anggota aktif organisasi pelajar/mahasiswa (OSIS atau BEM), *tarbiyah*<sup>8</sup> daring, menjadi anggota Paskibraka dan Pramuka, berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan, aktif dalam kegiatan memperingati hari kemerdekaan, dan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Contoh kegiatan informal adalah melakukan kajian tokoh<sup>9</sup>, dan mengajarkan Bahasa Inggris untuk anak-anak jalanan.

---

<sup>7</sup>Kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan kegiatan normal, tetapi dengan tambahan berupa implementasi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

<sup>8</sup>*Tarbiyah* dalam bahasa Arab berarti pendidikan. Kegiatan *tarbiyah* harus diikuti oleh anggota Rohis (Kerohanian Islam).

<sup>9</sup>Kajian Tokoh adalah kajian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum untuk mendiskusikan tokoh tertentu. Diskusi dilakukan secara daring maupun luring.

### **Kotak 1**

#### **Kegiatan responden laki-laki**

Responden adalah anggota Komunitas Pemuda Pemerhati Sosial dan Lingkungan (Kopsling). Kopsling memiliki kegiatan-kegiatan yang menerapkan gerakan nol limbah, membantu pengelolaan sampah desa, dan berkolaborasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN adalah perusahaan milik negara yang mengelola urusan kelistrikan di Indonesia. Program ini bertujuan memberdayakan komunitas agar tidak membuang sampah sembarangan dan menggali nilai ekonomis dari limbah.

Responden juga bertindak sebagai sukarelawan COVID-19 untuk mengingatkan masyarakat agar mempraktikkan protokol kesehatan. Kegiatan ini diinisiasi secara pribadi (bukan wajib) karena responden melihat sendiri buruknya kondisi lingkungan, sampah, dan anak-anak putus sekolah di jalanan.

Responden juga mengungkapkan isu-isu terkait pentingnya melestarikan lingkungan dengan menanam pohon di Hari Bumi, dengan mengunggah di Instagram, dan dengan memobilisasi pemuda untuk memperbaiki dan membersihkan selokan untuk mencegah banjir. (Responden, laki-laki, 21 tahun, Kota Makassar, 2 April 2021)

Pemuda di Kota Makassar yang kritis terhadap kondisi lingkungan terlibat dalam isu partisipasi publik, misalnya menandatangani petisi daring, mengikuti pawai lingkungan, dan menulis cerita tentang pengelolaan limbah di media sosial. Para pemuda juga membantu warga setempat belajar lebih banyak tentang isu lingkungan dan isu-isu lain. Sebagai contoh, dalam acara "Ekobreak" pemuda membantu anak-anak belajar tentang lingkungan dan mempelajari Al Quran melalui kegiatan bercerita. Mereka juga mengadakan diskusi daring. "Logos" adalah contoh "studi karakter" yang mencakup menyampaikan ide sekelompok teman dalam bentuk tulisan secara daring maupun luring (luar jaringan). Contoh kegiatan lain adalah "*carring edu movement*" atau menjadi anggota klub literasi. Kotak 1 menggambarkan kegiatan responden pemuda terkait isu publik.

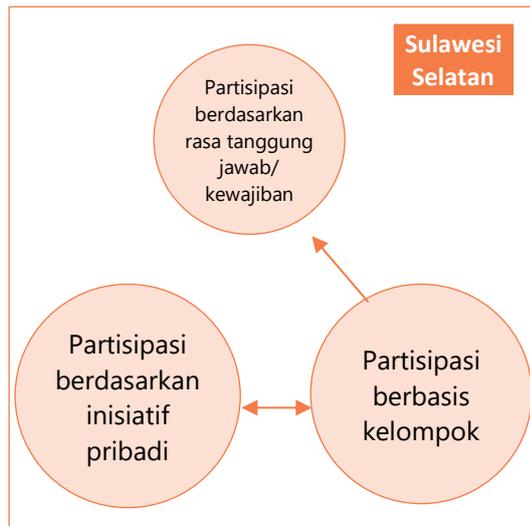
Contoh inisiatif pribadi sukarela antara lain membersihkan pantai dari sampah, menjadi donor darah, menggalang dana bagi korban bencana alam, berpartisipasi dalam kegiatan sedekah Jumat, dan bergabung dalam kelompok remaja masjid. Pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya berpartisipasi dalam kegiatan rutin, sementara sebagian lain bergabung dalam kegiatan yang hanya berlangsung satu kali. Di masa pandemi COVID-19, beberapa kegiatan menjadi kegiatan rutin, misalnya "Kosping," yakni program untuk melestarikan lingkungan dengan memberikan edukasi secara daring kepada masyarakat.

Jumlah responden di Kota Makassar dan sekitarnya cukup berimbang antara laki-laki (23 orang) dan perempuan (22 orang). Kegiatan pemuda laki-laki dan perempuan, secara umum, tidak jauh berbeda. Jenis kegiatan yang diinisiasi oleh pemuda perempuan berhubungan dengan lingkungan, menginisiasi usaha kecil dan menengah (UKM) di platform daring, menjadi sukarelawan, berpartisipasi dalam seminar tentang COVID-9 dan berita yang tidak benar dan kesempatan memberikan edukasi publik lain, serta mendirikan "Rumah Baca" (kegiatan literasi) di lingkungan mereka. Sementara, kegiatan yang dilakukan pemuda laki-laki mencakup penggunaan pendekatan musik untuk mengenalkan isu-isu toleransi keberagaman kepada murid sekolah menengah, pengabdian masyarakat, memperjuangkan hak pejalan kaki/pengguna trotoar, membantu korban di wilayah

bencana alam, dan membantu anak-anak dalam hal literasi, mengurangi limbah plastik, dan mencari cara untuk mengolah limbah agar dapat menjadi sumber penghasilan.

Untuk tindakan nyata, mungkin masih kurang karena saya masih dalam tahap memahami sebuah isu dari dalam. Karena itulah ada riset kota dalam bentuk acara sukarela tempo hari, [tentang] bagaimana menyosialisasikan sebuah isu, dipaketkan dalam bentuk acara Kalua sebagai demonstrasi langsung atau tindakan nyata terhadap isu publik. (Responden pemuda, laki-laki, 24 tahun, Kota Makassar, 27 Maret 2021).

**Gambar 4. Partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya**



Sumber: Analisis pengumpulan data, 2021.

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab, dan partisipasi berbasis kelompok. Partisipasi pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya mengenai isu-isu publik dipicu oleh dorongan dari dalam diri mereka sendiri dan tekanan dari luar. Ketika satu inisiatif pribadi bersinggungan dengan inisiatif dari pribadi-pribadi lainnya, maka mereka pun membentuk komunitas untuk melakukan kegiatan bersama. Sebagai contoh, dua pelajar membuat sejenis gerakan bernama "Carring Edu Movement" di platform media sosial Instagram. Gerakan ini menaruh perhatian pada pendidikan, terutama untuk anak-anak yang terpinggirkan. Organisasi ini dibentuk karena adanya kesadaran bahwa pemuda perlu bergerak untuk menciptakan inovasi pendidikan, termasuk bagaimana mereka dapat membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain berkumpul di sekolah atau kampus, pemuda di Kota Makassar biasa berkumpul di rumah teman mereka atau di pos keamanan perumahan atau di kedai kopi, dan kondisi ini justru memudahkan terwujudnya gerakan semacam ini. Partisipasi wajib biasanya dilakukan secara berkelompok.

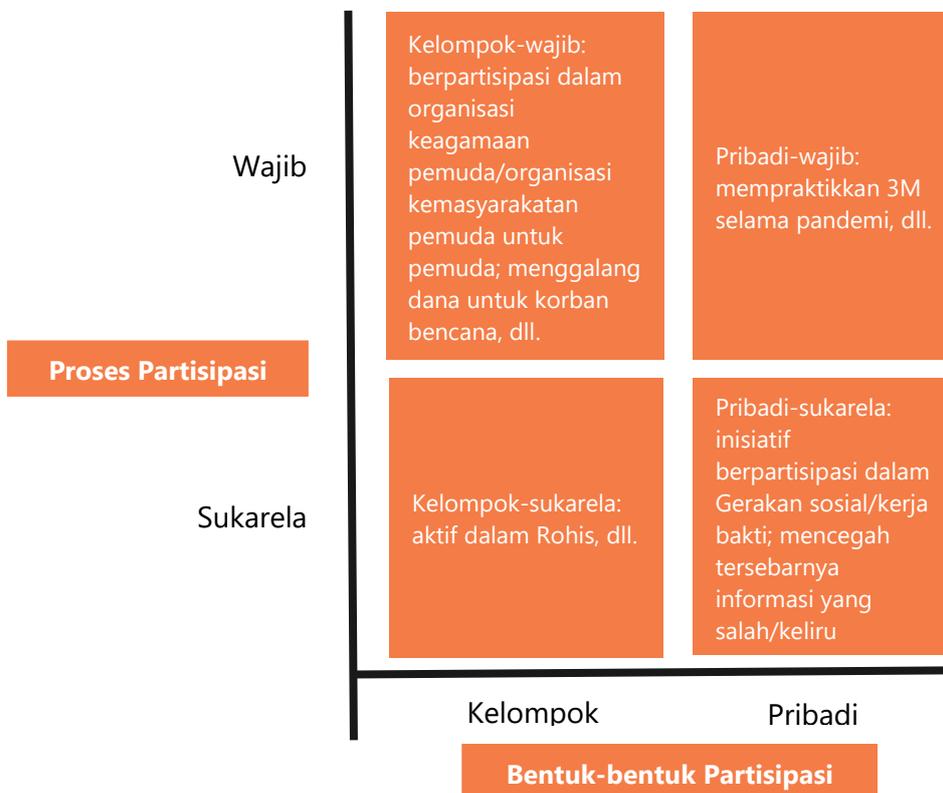
Ya, jika ada pemuda berkumpul di pos keamanan, saya mau saja bergabung dengan mereka, atau dengan para pemuda yang duduk-duduk berkumpul, menurut saya, mereka yang masih muda akan duduk-duduk dan membicarakan apa saja, entah soal maling ayam, gagal panen, setidaknya saya punya informasi. (Responden pemuda, perempuan, 27 tahun, Kota Makassar, 5 April 2021).

Seorang responden di Kota Makassar mengatakan bahwa warga Kota Makassar gemar membicarakan urusan pemerintah sambil minum kopi. Partisipasi publik dapat diinisiasi secara mandiri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, menyelenggarakan layanan sosial di lingkungan/komunitas dengan tingkat ekonomi rendah, padat penduduk, dan drainase buruk. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Kegiatan kelompok ini dianggap penting karena dibutuhkan kelompok besar agar dapat memengaruhi orang banyak.

Satu orang dapat memulai layanan sosial ini, dia akan terus mengajak orang hingga semakin banyak orang bergabung ... Melakukannya secara berkelompok malah lebih menyenangkan ... Karena proses memengaruhi orang banyak tidak bisa hanya oleh satu orang, jadi, butuh satu kelompok besar untuk menggerakkan mereka. (Responden pemuda, laki-laki, 21 tahun, Kota Makassar, 2 April 2021).

Berdasarkan kompleksitas kegiatan pemuda yang merupakan kombinasi dari pribadi/kelompok dengan wajib/sukarela, didapatkan kombinasi kelompok-wajib, kelompok-sukarela, pribadi-wajib, dan pribadi-sukarela. Gambar di bawah menunjukkan bahwa kegiatan kelompok-wajib mencakup berpartisipasi dalam organisasi keagamaan pemuda, berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan pemuda, dan lain-lain. Mempraktikkan 3M selama pandemi adalah contoh kegiatan pribadi-wajib. Sementara, kegiatan kelompok-sukarela mencakup aktif dalam Rohis, dan sebagainya. Kegiatan pribadi-sukarela mencakup inisiatif untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial, inisiatif untuk ikut kerja bakti, mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks, dan lain-lain. Detail kegiatan wajib dan sukarela pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya yang dilakukan secara berkelompok dan sendiri-sendiri disajikan pada Lampiran 2.

**Gambar 5. Bentuk dan proses partisipasi sipil pemuda**



Sumber: Analisis pengumpulan data, 2021.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar melakukan beragam kegiatan partisipasi publik secara berkelompok atau kolektif, atau dengan kata lain, secara bergotong royong. Responden di Kota Makassar mengatakan bahwa orang Makassar menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati dan mencari solusi dari berbagai masalah dengan duduk bersama.

Kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge* (saling memanusaiakan, saling menghormati, saling mengingatkan). Jika timbul masalah, kita berusaha memecahkannya dengan menjunjung nilai tudang *sipulung* (duduk bersama untuk mencari solusi) sehingga nilai-nilai budaya pun terpelihara. (Pejabat pemerintah daerah, laki-laki, Kota Makassar, 8 April 2021).

## 5.2 Faktor dan Aktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Sipil Pemuda

Dua faktor diketahui memengaruhi partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan profil responden dan dorongan internal mereka, termasuk kesediaan, keprihatinan, dan kesadaran. Faktor eksternal berkaitan dengan konteks lingkungan sosial di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Usia responden mengacu pada bagaimana profil keseluruhan responden membentuk partisipasi mereka saat ini. Sebagaimana dapat dilihat pada subbab **2.2 Profil Informan**, sebagian besar responden berusia antara 16 dan 25 tahun. Secara spesifik, lebih banyak responden berusia 16 hingga 20 tahun. Profil kelompok usia ini mungkin memengaruhi kecenderungan pemuda untuk aktif dalam partisipasi publik sebagaimana dapat dilihat pada keaktifan dan variasi gerakan kolektif atau kelompok yang melibatkan para pemuda. Berdasarkan wawancara mendalam, para responden juga tertarik untuk mengeksplorasi dan mencoba pengalaman baru, misalnya dengan aktif mencari aktivitas sipil dan/atau bergabung dalam komunitas tertentu. Sebagian besar responden mengatakan bahwa berpartisipasi dalam komunitas tertentu penting untuk membangun jaringan sosial, mengembangkan kemampuan mereka, dan mendapat pengetahuan yang lebih luas mengenai isu-isu tertentu. Sebagian responden juga mengatakan berkat adanya komunitas dan kelompok yang bisa mereka ikuti, tidak bergabung sama saja dengan menyia-nyaiakan kesempatan. Perilaku mengeksplorasi di periode usia ini juga sesuai dengan pendapat Erikson (1962) yang menyatakan bahwa periode ini dicirikan oleh kerancuan peran (*role confusion*), yang mengarah pada proses eksplorasi. Oleh karena itu, perilaku ini pun menjadi lazim pada pemuda di periode usia tertentu. Perbedaan utama yang dialami pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dapat mendorong partisipasi pemuda lebih lanjut, terutama dalam hal perilaku/tindakan, yang akan dianalisis lebih jauh di bawah ini.

Sekarang ini, sebagian pemuda hanya bermain gim (*game*), berkumpul tanpa tujuan. Itu karena mereka tidak punya kegiatan lain, tidak tahu harus melakukan apa, dan hanya bermain gim. (Responden pemuda, laki-laki, 16 tahun, 5 April 2021).

Kami juga menemukan bahwa partisipasi responden didorong oleh beragam motivasi karena sebagian besar responden masih mencoba-coba dan motivasi mereka terutama

berdasarkan isu-isu yang pada saat itu sedang menyita perhatian mereka. Sebagai contoh, salah satu responden mengatakan bahwa pemuda di Kota Makassar masih butuh ruang lebih untuk mengekspresikan diri. Oleh karena itu, responden ini ingin membentuk komunitas untuk mencapai tujuan itu. Responden lain ingin membentuk komunitas yang fokus pada masalah limbah karena responden berpendapat bahwa kondisi lingkungan di Kota Makassar dan sekitarnya kian memburuk. Ini perlu diperhatikan karena walaupun banyak dari responden dalam studi ini masih di tahap awal dari pengalaman partisipasi sipil dan masih mencoba-coba peluang yang ada disebabkan oleh usia mereka, kecenderungan untuk berpartisipasi tetap didorong oleh berbagai isu publik. Dalam hal ini, rasa kesadaran dan keprihatinan mereka dapat dikatakan menjadi poin penting yang hadir dalam pengalaman partisipasi sipil awal mereka. Kesadaran dan keprihatinan menjadi faktor umum yang teridentifikasi membangkitkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan mendorong sebagian responden untuk merealisasikan kesediaan ini menjadi sebuah tindakan. Rasa kesadaran itu sendiri dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pengalaman pribadi dan masalah yang ada di sekitar mereka.

... terlebih lagi, (Kota) Makassar masih kurang bersahabat terhadap perempuan, kami tidak diberi kesempatan untuk berbicara, bahwa kita sebetulnya punya kesamaan. Itu sebabnya saya tertarik dengan budaya patriarki ketimuran, karena itulah isu ini harus dibahas secara publik. (Responden pemuda, perempuan, 28 tahun, Kota Makassar, 29 April 2021)

Faktor eksternal terutama terkait dengan dua poin, yaitu (i) komunitas yang sudah ada dan masih aktif di Kota Makassar dan sekitarnya, dan (ii) budaya di Kota Makassar dan sekitarnya terkait kolektivisme. Poin pertama berkaitan dengan tuntutan akan adanya platform kolektif yang tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan sosial di wilayah yang memiliki beragam komunitas dengan fokus pada berbagai minat dan isu. Poin kedua berhubungan dengan alasan mengapa pemuda memiliki kecenderungan terhadap inisiatif tertentu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Kedua poin ini bisa dikatakan menjadi faktor pendukung dapat terlibatnya pemuda di Makassar dan sekitarnya dalam ruang dan isu publik.

Pertama, minat pemuda untuk terlibat atau menjadi anggota komunitas atau ikut kegiatan diakomodasi melalui komunitas atau gerakan yang sudah ada atau sedang berkembang di Kota Makassar dan sekitarnya. Komunitas-komunitas ini juga kian saling terhubung satu sama lain, sehingga mampu mendukung lebih jauh lingkungan sosial yang memungkinkan partisipasi sipil pemuda dalam berbagai isu publik. Sebagai contoh, seiring dengan meningkatnya kegiatan bersama atau kolaborasi antarkomunitas, pada 2019, Pesta Komunitas Makassar (PKM) pun diselenggarakan. PKM adalah kegiatan pameran yang diikuti oleh banyak komunitas, terutama di Kota Makassar. Pada 2019 saja, PKM diikuti oleh lebih dari 300 komunitas, yang mencakup berbagai isu dan minat. Keberadaan komunitas-komunitas ini—yang juga berkembang menjadi bagian dari ekosistem sosial di Kota Makassar dan sekitarnya—mungkin tidak secara langsung mendorong pemuda untuk berpartisipasi. Namun, komunitas-komunitas tersebut menjadi bagian penting yang mengakomodasi dorongan pemuda untuk berpartisipasi.

Kedua, dorongan untuk berpartisipasi ini juga bisa dilihat dari pengaruh budaya dan nilai di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, yang menekankan pada kolektivisme atau solidaritas. Hal ini bukan berarti bahwa di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya,

partisipasinya cenderung berupa partisipasi berbasis kelompok, tetapi lebih pada bagaimana pemuda biasanya terhubung melalui kebiasaan berkumpul-kumpul orang Makassar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh budaya Makassar Bugis yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Pemuda bisa dikatakan memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dalam melakukan partisipasi mereka sendiri (pribadi-sukarela) dan/atau partisipasi kelompok-sukarela berkat "terkoneksinya" para pemuda. Melalui kegiatan berkumpul-kumpul, para pemuda bisa membicarakan dan bertukar ide mengenai beragam topik, termasuk topik yang berhubungan dengan isu-isu publik dan peluang/pilihan partisipasi sipil. Temuan ini juga sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner dan Morris (1998) mengenai hubungan timbal-balik antara individu dan lingkungannya, sebuah hubungan yang akan membentuk perilaku individu tersebut. Secara spesifik, bisa dikatakan bahwa faktor ini adalah bagian makrosistem dari lingkungan yang berhubungan dengan perilaku individu, yang dalam konteks ini, adalah kecenderungan pemuda terhadap partisipasi sipil di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya (Bronfenbrenner dan Morris, 1998).

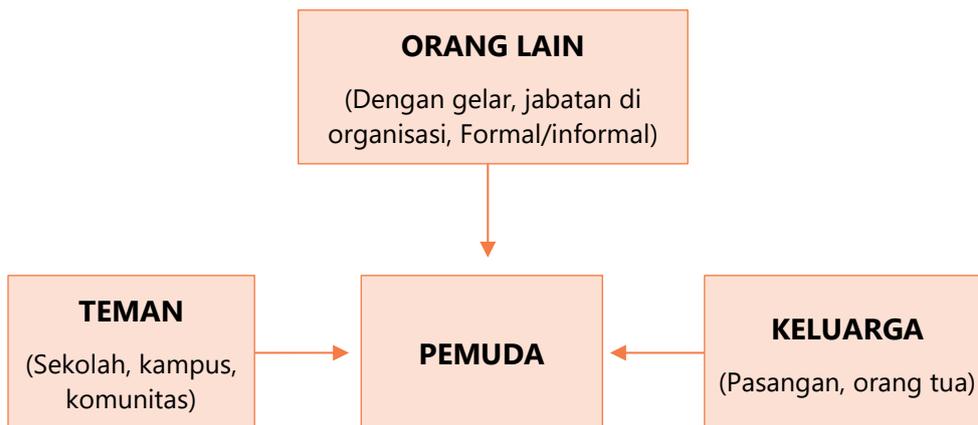
Saya kadang bergabung dengan para pria di pos ronda, atau ketika para wanita berkumpul. Jika mereka masih muda, mereka sering berbicara tentang apa saja yang sedang terjadi, walau kadang itu hanya pencurian, gagal panen, setidaknya saya jadi tahu. (Responden pemuda, perempuan, 27 tahun, Kota Makassar, 5 April 20210)

Di Kampung Buku, banyak pemuda kadang datang dan berkumpul untuk berdiskusi tentang banyak program. Mereka juga secara rutin mengadakan acara bersama. (Akademisi setempat, laki-laki, Kota Makassar, 27 April 2021)

Berdasarkan wawancara mendalam, teridentifikasi tiga kategori aktor utama yang berpengaruh terhadap partisipasi sipil responden. Ketiga kategori aktor utama ini adalah teman sebaya, keluarga, dan kolega/rekan di komunitas/organisasi. Aktor-aktor lain, misalnya pemerintah dan lembaga pendidikan, diketahui tidak memiliki pengaruh terhadap responden saat ini meskipun lembaga-lembaga ini memiliki program yang melibatkan pemuda, misalnya, program pertukaran pelajar dan program nasionalisme pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, pengaruh para aktor ini secara umum dapat dilihat pada Gambar 6.

Teman bisa memengaruhi karena kegiatan berkumpul membuat pemuda yang memiliki kesamaan visi dapat membentuk komunitas untuk melakukan kegiatan bersama. Orang tua juga memengaruhi pemuda, sebagai contoh, orang tua yang menjadi pengurus masjid akan meminta anak-anak mereka mengajak teman-temannya agar aktif dalam kegiatan masjid atau si anak sendiri mengambil inisiatif untuk membantu orang tuanya dalam kegiatan masjid, misalnya membersihkan lingkungan masjid. Satu contoh lain adalah orang tua mengusulkan kepada anaknya agar membantu sesama, misalnya menggalang dana untuk korban bencana. Penggalangan dana dilakukan dari rumah ke rumah, sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Orang lain yang memengaruhi pemuda antara lain pembina Paskibraka, OSIS, atau BEM.

**Gambar 6. Aktor yang memengaruhi pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya**



Sumber: Analisis pengumpulan data, 2021.

Bentuk partisipasi lainnya adalah hubungan kerja antara pemuda dan orang lain karena posisi mereka. Dalam hal ini, partisipasi pemuda bersifat wajib. Hubungan kerja ini bisa juga terjadi di sekolah, kampus, atau lembaga/program/kegiatan lain karena kegiatan ini bersifat instruksional, sehingga berlangsung secara vertikal. Dalam hal ini, partisipasi pemuda dilakukan secara berkelompok. Partisipasi wajib pemuda ini erat kaitannya dengan orang lain karena posisi mereka atau karena struktur organisasi. Oleh karena itu, kegiatan wajib bersinggungan dengan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok (karena struktur posisi, atau alasan lain). Hal ini sejalan dengan kategori partisipasi vertikal atau horizontal (Dwiningrum 2011). Partisipasi vertikal terjadi jika komunitas berstatus sebagai bawahan atau pengikut. Dalam partisipasi horizontal, komunitas menginisiasi kegiatannya sendiri. Dalam hal ini, partisipasi dari sebagian responden didorong oleh dinamika partisipasi vertikal.

Aktor-aktor yang memengaruhi pemuda tidak selalu parsial; mereka bisa secara bersama-sama memengaruhi pemuda, bersinergi untuk mendukung kegiatan di komunitasnya. Sebagai contoh, seorang responden memiliki kebiasaan menjaga kebersihan tempat tinggalnya yang diturunkan dari kakek dan neneknya kepada orang tuanya. Kebiasaan ini menjadi gaya hidup bagi responden yang selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah ini, dan dia termotivasi untuk menyebarkan kebiasaan ini ke lingkungannya. Teman-temannya mendukung kegiatan ini dan mereka membentuk Komunitas Air Tawar, yang kegiatannya antara lain mengedukasi masyarakat dan pemuda mengenai pentingnya merawat lingkungan.

Saya dididik oleh orang tua untuk menjaga lingkungan dan dalam keluarga saya, saya sangat fokus pada lingkungan, mulai dari orang tua, kakek dan nenek. (Responden, laki-laki, 17 tahun, 27 Maret 2021)

Satu hal penting yang perlu dicatat adalah adanya argumen dari responden bahwa isu-isu publik adalah urusan pemerintah. Salah satu responden mengatakan bahwa isu terkait partisipasi publik adalah tanggung jawab pemerintah, sementara di sisi lain, individu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Responden juga menyatakan bahwa semua masalah publik menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab individu pemuda, terutama di wilayah perkotaan, tempat citra partisipasi publik makin berbeda

dengan citra partisipasi publik di wilayah perdesaan. Di wilayah perdesaan, keterlibatan pemuda didukung oleh struktur sosial yang ada. Dari semua responden, kami hanya menemukan satu orang yang berargumen seperti ini. Walau demikian, pandangan ini tetap perlu untuk ditelisik lebih jauh karena pandangan semacam ini mungkin juga dimiliki oleh pemuda lain, tetapi tidak mudah mengemuka.

## VI. Kesimpulan: Pelajaran Terpetik

Partisipasi sipil dalam studi ini dipahami sesuai dengan ranahnya (ranah publik), jenis tindakan (aksi, alih-alih ketiadaan aksi), bentuknya (pribadi dan kolektif), dan tujuannya (kesejahteraan). Di sisi lain, sebagian memahami partisipasi sipil dalam hal ada tidaknya minat, yang berhubungan dengan kesadaran atau kepedulian terhadap isu-isu publik. Untuk menangkap nuansa partisipasi sipil ini, kami terutama mengamati partisipasi sipil melalui perilaku. Selain itu, partisipasi sipil dapat pula dipahami dari aspek penciptaan ide. Oleh karena itu, kita mendefinisikan partisipasi sipil pemuda sebagai minat atau tindakan terhadap isu-isu publik, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas/kelompok.

Mengingat partisipasi sipil dipahami terutama dalam kaitannya dengan perilaku, kami merekam bentuk-bentuk partisipasi, entah yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif. Selain mengidentifikasi partisipasi yang dikerjakan oleh individu maupun oleh sekelompok orang, cara utama untuk membedakan partisipasi individu dari partisipasi berbasis kelompok adalah dengan melihat inisiatif dan sifat dari partisipasi tersebut. Sebagai contoh, inisiatif untuk bergabung dalam kegiatan kerja bakti ketika kerja bakti tersebut bersifat opsional berbeda dengan inisiatif ketika kegiatan tersebut bersifat wajib. Jika sifatnya opsional, bisa dikatakan inisiatif atau tindakan untuk bergabung itu sendiri merupakan partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi. Tidak bisa dikatakan secara otomatis bahwa ikut serta dalam kegiatan kerja bakti adalah partisipasi berbasis kelompok, terutama apabila kegiatan itu bersifat wajib, karena kegiatan kerja bakti ini dapat dikerjakan oleh kelompok *ad hoc* (sesuai kebutuhan). Dalam hal ini, partisipasi berbasis kelompok mencoba menangkap keterlibatan pemuda dalam komunitas atau organisasi yang sudah mapan, yang di dalamnya mereka dapat terlibat dalam kegiatan lain yang dikerjakan kelompok itu di kemudian hari, dibandingkan dengan kelompok *ad hoc*. Jadi, keputusan atau tindakan untuk bergabung dalam gerakan *ad hoc* untuk ikut serta dalam kegiatan publik atau untuk tujuan tertentu lebih ditekankan pada inisiatif individu.

Perlu diperhatikan pula bahwa pembedaan antara partisipasi sukarela dan partisipasi wajib membuat kita bisa mendapat lebih banyak informasi mengenai kekhususan bentuk-bentuk partisipasi. Berdasarkan studi ini, dapat kita lihat bahwa sudah ada beragam bentuk partisipasi individu yang dilakukan oleh pemuda di Kota Denpasar dan Kota Makassar. Temuan ini berlawanan dengan temuan bahwa inisiatif pribadi di Kota Denpasar tidak lebih sering dibandingkan dengan variabel partisipasi lain. Partisipasinya masih tersebar jika dibandingkan dengan partisipasi wajib, terutama partisipasi kelompok-wajib, yang terkonsentrasi di antara sebagian besar responden di Kota Denpasar. Untuk konteks ini, temuan di Kota Denpasar berbeda dengan temuan di Kota Makassar, yakni konsentrasi partisipasi untuk inisiatif pribadi dan variabel berbasis kelompok sesuai dengan variasi yang ditemukan pada partisipasi pribadi-sukarela dan partisipasi kelompok-sukarela. Walau demikian, ini bukan berarti bahwa kondisi partisipasi sipil pemuda di Kota Makassar lebih baik daripada di Kota Denpasar mengingat hal ini hanya menunjukkan bahwa bentuk partisipasi sukarela di Makassar lebih beragam.

Dari studi ini, teramati bahwa ketiga variabel partisipasi—partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban, dan partisipasi berbasis kelompok—sangat terkontekstualisasi dalam bentuknya dan saling berkelindan satu sama lain. Variabel-variabel ini sangat terkontekstualisasi karena partisipasi sering kali juga bernuansa dengan faktor-faktor sosial lain, seperti rasa memiliki dan identitas (sebagai warga negara, sebagai bagian dari sebuah budaya, sebagai kaum muda dalam konteks sosial tertentu) dan tekanan sosial (gosip, pengucilan). Ketiganya juga saling berkelindan karena satu bentuk partisipasi punya kecenderungan mengaktifkan atau memengaruhi bentuk partisipasi lain. Sebagai contoh, keterlibatan dalam sebuah komunitas/organisasi yang menginspirasi pemuda untuk menggunakan akun media sosial pribadi mungkin akan mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi komunitas itu. Oleh karena itu, agar dapat menangkap karakter atau sifat dari partisipasi pemuda, partisipasi tersebut perlu dilihat bukan hanya dari bentuknya, tetapi juga dari minat yang mendasari, motivasi dan konteksnya.

Pentingnya menangkap sifat dari partisipasi pemuda berhubungan dengan bentuk partisipasi sipil pemuda yang menurut kita ideal. Walau mungkin tidak ada model ideal partisipasi sipil pemuda yang sifatnya universal, terutama dalam konteks antarwilayah yang berbeda, akan tetapi, bisa dikatakan bahwa ada kondisi-kondisi umum dari partisipasi sipil muda yang lebih disukai. Kita bisa melihat bahwa dalam variabel partisipasi yang sama ada lapisan atau kedalaman yang berbeda dari bentuk-bentuk partisipasi. Sebagai contoh, berpartisipasi dalam sebuah gerakan sosial atau berdonasi untuk tujuan sosial dan menginisiasi kampanye sosial daring adalah sama-sama partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, tetapi pada lapisan dan kedalaman yang berbeda. Menginisiasi kampanye sosial daring memiliki kompleksitas lebih tinggi dan bisa dikatakan membutuhkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan memberikan donasi atau berpartisipasi dalam sebuah gerakan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut juga berbeda dalam hal kompleksitas dan tingkat keterlibatannya. Memimpin sebuah inisiatif untuk membuat komunitas untuk mencapai tujuan tertentu bisa dikatakan ada pada lapisan yang berbeda dengan menjadi anggota sebuah komunitas, meskipun keduanya dapat dianggap sebagai partisipasi berbasis kelompok.

Tidak banyak responden dari studi ini yang telah terlibat dalam bentuk partisipasi sipil yang umumnya menuntut tingkat kepercayaan diri, kompleksitas, dan keterlibatan yang lebih tinggi. Dalam hal partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi, sebagian besar responden di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya yang telah terlibat dalam partisipasi publik pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti membagikan informasi atau menjadi bagian dari gerakan *ad hoc*, terutama yang berhubungan dengan isu-isu budaya. Nuansa serupa ditemukan di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Di Kota Makassar dan sekitarnya pemuda baru mulai terlibat dalam isu partisipasi sipil pribadi. Dalam partisipasi berbasis kelompok, sebagian besar responden juga terlibat dalam isu-isu publik karena mereka menjadi anggota organisasi tertentu. Namun, hal ini bukan berarti bahwa partisipasi sipil pemuda di Kota Denpasar dan Kota Makassar berkualitas rendah atau tingkat keterlibatan mereka rendah. Sebaliknya, hal ini justru memperlebar potensi bagi pemuda di kedua wilayah ini untuk meningkatkan partisipasi mereka, baik dalam hal isu-isu yang diangkat, bentuk partisipasi yang dilakukan, cakupan partisipasinya, dan lain-lain. Perlu juga dicatat bahwa lapisan dan kedalaman partisipasi di Kota Makassar mungkin dipengaruhi oleh profil responden, yang sebagiannya terdiri atas pemuda usia sekolah

menengah (16–18 tahun). Ini agak berbeda dengan profil responden di wilayah Kota Denpasar, yang sebagian besar terdiri atas mahasiswa (18–25 tahun) dan tidak ada pemuda di sekolah menengah (16–18 tahun).

Sebagai bagian dari partisipasi sipil pemuda, ketiga variabel partisipasi bisa dikatakan penting, tetapi berdasarkan temuan, faktor utama yang memengaruhi partisipasi publik adalah sejauh mana suatu kegiatan didorong oleh sebuah kelompok. Pentingnya variabel lain mungkin bergantung pada konteks wilayah. Sebagai contoh, partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban diketahui berperan penting dalam memengaruhi partisipasi sipil pemuda di Kota Denpasar. Hal ini penting bagi masyarakat setempat karena kewajiban berkaitan erat dengan budaya dan adat istiadat yang mengakar kuat di Bali. Namun, di saat yang sama, keterlibatan pada platform kolektif, terutama komunitas atau organisasi, diketahui memiliki dan berpotensi lebih jauh memengaruhi partisipasi sipil pemuda di Kota Denpasar dan Kota Makassar. Melalui komunitas/organisasi, pemuda dapat memperluas partisipasi mereka, baik melalui inisiatif pribadi maupun dengan mengerjakan program komunitas atau organisasi mereka.

Partisipasi berbasis kelompok bisa memiliki arti penting karena komunitas/organisasi dapat membuat pemuda terekspos isu yang lebih beragam serta memperluas cakupan partisipasi pemuda. Hal ini terutama terlihat di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar, partisipasi berbasis kelompok saat ini lebih didorong oleh partisipasi berdasarkan rasa tanggung jawab/kewajiban karena budaya dan adat istiadat yang kuat mengakar. Di sisi lain, partisipasi berbasis kelompok juga bisa mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam lingkup yang lebih luas atau mengenai isu yang lebih beragam. Di wilayah perkotaan, komunitas/organisasi memegang peranan penting untuk melibatkan pemuda dalam isu-isu publik yang relevan, seperti lingkungan hidup, kebijakan publik, dan pembangunan di Bali. Dalam hal ini, gerakan ForBALI dapat menjadi titik tolak partisipasi sipil pemuda dalam isu yang lebih beragam dan cakupan partisipasi yang lebih luas di Bali.

Di saat yang sama, partisipasi pemuda di Kota Makassar juga didorong oleh lingkungan yang mendukung dari beragam komunitas dan organisasi yang menjadi wadah pemuda untuk berpartisipasi. Hal ini juga dapat dilihat dari temuan yang menunjukkan bahwa pemuda di Kota Makassar lebih terlibat dalam bentuk partisipasi kelompok-sukarela yang lebih bervariasi daripada pemuda di Kota Denpasar. Komunitas/organisasi kian menjadi bagian penting dalam partisipasi dan gerakan pemuda di Kota Makassar dan sekitarnya. Terkait hal ini, partisipasi berbasis kelompok berkelindan dengan partisipasi berdasarkan inisiatif pribadi. Hal ini terjadi karena keterlibatan dalam sebuah kelompok juga mendorong sebagian pemuda untuk memperluas partisipasi mereka di luar kelompok itu. Inisiatif-inisiatif dari individu berbeda di Kota Makassar cenderung saling bersinggungan dan mengarah kepada partisipasi berbasis kelompok, meskipun hal ini belum ditemukan di antara responden.

Oleh karena itu, partisipasi berbasis kelompok menjadi salah satu poin penting untuk memperluas atau “menaikkan derajat” partisipasi sipil pemuda baik di wilayah Kota Denpasar maupun Kota Makassar. Hal ini bukan berarti bahwa partisipasi sipil pemuda saat ini masih minimal atau kurang, ini justru menunjukkan bahwa ada ruang untuk memperluas ranah publik untuk melibatkan pemuda secara aktif di dalamnya. Masih ada hambatan di tingkat masyarakat lokal, misalnya hubungan patron-klien yang terlihat pada

STT di dusun-dusun atau *Banjar* di Bali. Tantangan juga dihadapi pemuda untuk berpartisipasi dalam konteks yang lebih luas, misalnya kurangnya rasa percaya diri, sikap kritis, dan ketakutan akan balasan. Terkait hal ini, partisipasi berbasis kelompok dapat dieksplorasi lebih jauh agar dapat makin memotivasi pemuda, yaitu dengan mengubah faktor-faktor intrinsik (kepercayaan diri) dan dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemuda untuk berpartisipasi (bertambahnya jumlah pemuda di platform kolektif). Hal ini mungkin sangat penting bagi pemuda agar bisa lebih aktif dan lebih percaya diri dalam menyuarakan keprihatinan dan opini mereka dalam ranah publik, baik secara daring maupun luring.

# Daftar Acuan

- Adler, Richard P., dan Judy Goggin (2005) 'What Do We Mean By 'Civic Engagement'?' *Journal of Transformative Education* 3 (3): 236–53. DOI: 10.1177/1541344605276792.
- Arnstein, Sherry R. (1969) 'A Ladder of Citizen Participation.' *Journal of the American Institute of Planners* 35 (November 1969): 37–41. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225>.
- Badan Pusat Statistik-Statistics Kabupaten Regency, (2021) 'Kabupaten Badung dalam Angka 2021' [online] <<https://badungkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/7894ebb7742675f019a69f1c/kabupaten-badung-dalam-angka-2021.html>> [21 April 2021].
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar (2021) 'Kota Denpasar dalam Angka 2021' [online] <<https://denpasarkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/b93a65251e252b8a7b37e7ed/kota-denpasar-dalam-angka-2021.html>> [21 April 2021].
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2021) 'Kota Makassar dalam Angka 2021' [online] <<https://makassarkota.bps.go.id/publication/2021/02/26/be312e3f776bcfd005978bda/kota-makassar-dalam-angka-2021.html>> [21 April 2021].
- Ballard, Parissa J., Heather Malin, Tenelle J. Porter, Anne Colby, dan William Damon (2015) 'Motivations for Civic Participation Among Diverse Youth: More Similarities than Differences.' *Research in Human Development* 12 (1–2): 63–83. DOI: 10.1080/15427609.2015.1010348.
- Banaji, Shakuntala dan David Buckingham (2013) *The Civic Web: Young People, the Internet, and Civic Participation*. Massachusetts: The MIT Press.
- Berger, Ben (2009) 'Political Theory, Political Science and the End of Civic Engagement.' *Perspectives on Politics* 7(2): 335–50.
- Bräuchler, Birgit (2020) 'Bali Tolak Reklamasi: The Local Adoption of Global Protest.' *Convergence* 26(3): 620–38.
- Checkoway, Barry, dan Adriana Aldana (2013) 'Four Forms of Youth Civic Engagement for Diverse Democracy.' *Children and Youth Services Review* 35 (11): 1894–99. DOI: 10.1016/j.childyouth.2013.09.005.
- Cho, Alexander, Jasmina Byrne, dan Pelter Zoe (2020) 'Digital Civic Engagement by Young People.' [dalam jaringan] <<https://www.unicef.org/globalinsight/media/706/file/UNICEF-Global-Insight-digital-civic-engagement-2020.pdf>> [23 Maret 2021].
- Darmendra, I Putu (2016) 'STT Widayatmika Tolak Reklamasi, Ini Yang Dilakukan!' *Tribun-Bali.com* 27 Mei [daring] <<https://bali.tribunnews.com/2016/05/27/stt-widyatmika-tolak-reklamasi-ini-yang-dilakukan>>

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2011) *Desentralisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwyer, Leslie (2009) 'A Politics of Silences: Violence, Memory, and Treacherous Speech in Post-1965 Bali.' Dalam *Genocide, Truth, Memory and Representation: Anthropological Approaches*. A. Hinton dan K. O'Neill (eds.). Durham: Duke University Press. DOI: 10.1515/9780822392361-006.
- Ekman, Joakim dan Erik Amnå (2012) 'Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology.' *Human Affairs* 22 (3): 283–300. DOI: 10.2478/s13374-012-0024-1.
- Evans-Pritchard (1951) *Social Anthropology*. London: Cohen & West.
- Herskovits, M. J. (1964) 'The Reality of Culture.' In *Setangkai Bunga Sosiologi*. S. Soemardjan dan S. Soemardi (eds.). New Haven: Yale University Press.
- Jans, M. dan Kurt De Backer. 2010. *Youth (-Work) and Social Participation: Elements for a Practical Theory*. Brussels: Flemish Youth Council.
- Malinowski, Bronislaw (1945) *The Dynamics of Culture Change*. P. M. Kaberry (ed.). New Haven: Yale University Press.
- . 1960. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. New York: Oxford University Press.
- Milošević-Dorđević, Jasna S., dan Iris L. Žeželj. 2017. 'Civic Activism Online: Making Young People Dormant or More Active in Real Life?' *Computers in Human Behavior* 70: 113–18. DOI: 10.1016/j.chb.2016.12.070.
- Mirazchiyski, Plamen, Daniel H. Caro, dan Andrés Sandoval-Hernández (2014) 'Youth Future Civic Participation in Europe: Differences Between the East and the Rest.' *Social Indicators Research* 115 (3): 1031–55. DOI: 10.1007/s11205-013-0258-2.
- Paath, Carlos K.Y., Primus Dorimulu, dan Emmanuel Kure (2021) 'Momentum Is Building for Notorious UU ITE Amendment.' *Jakarta Globe* 23 Februari [dalam jaringan] <<https://jakartaglobe.id/news/momentum-is-building-for-notorious-uu-ite-amendment>> [6 Mei 2021].
- Pontes, Ana, Matt Henn, dan Mark Griffiths (2018) 'Towards a Conceptualization of Young People's Political Engagement: A Qualitative Focus Group Study.' *Societies* 8 (1): 17. DOI: 10.3390/soc8010017.
- Putnam, Robert D. (2000) *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster. DOI: DOI:10.1145/358916.361990.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952) *Structure and Function in Primitive Society*. Illinois: The Free Press.

Shaw, Aileen et al. (2014) 'Understanding Youth Civic Engagement: Debates, Discourses, and Lessons from Practice.' *Community Development* 45 (4): 300–316.

Van Deth, Jan W. 2014. 'A Conceptual Map of Political Participation.' *Acta Politica* 49 (3): 349–367. DOI:10.1057/ap.2014.6.

Voicu, Malina dan Bogdan Voicu (2016) 'Civic Participation and Gender Beliefs: An Analysis of 46 Countries.' *Sociologicky Casopis* 52 (3): 321–45. DOI: 10.13060/00380288.2016.52.3.261.

White, L. (1959) 'The Concept of Culture.' *American Anthropologist* 61: 227–251.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden No. 51/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.

Undang-Undang No. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

# Lampiran

Lampiran 1  
 Bentuk-bentuk Partisipasi Sipil Pemuda yang Teridentifikasi di  
 Wilayah Kota Denpasar dan Sekitarnya

Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja bakti/membersihkan lingkungan</li> <li>- Berpartisipasi dalam kegiatan adat Bali</li> <li>- Berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan setempat (STT)</li> <li>- <i>Ngayah</i></li> <li>- Aktif dalam organisasi kepemudaan setempat (STT)</li> <li>- Aktif dalam organisasi keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan hak pilih dalam pemilu</li> <li>- Membantu tetangga</li> <li>- Taat hukum dan mematuhi peraturan.</li> </ul>
Sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktif dalam organisasi kebudayaan</li> <li>- Aktif dalam organisasi literasi</li> <li>- Aktif dalam organisasi pecinta lingkungan</li> <li>- Menginisiasi organisasi ketahanan pangan setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyumbang untuk amal</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan/gerakan perlindungan budaya Bali</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam gerakan/kegiatan pecinta lingkungan</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti/pembersihan</li> <li>- Melakukan kampanye sosial/mengedukasi publik</li> <li>- Mencegah penyebaran informasi bohong/informasi tidak akurat/hoaks</li> <li>- Mengambil inisiatif gerakan/kegiatan perlindungan budaya Bali</li> <li>- Mengonsumsi produk lokal</li> <li>- Mempromosikan produk lokal.</li> <li>- Menjaga kebersihan lingkungan.</li> <li>- Memberikan bimbingan belajar pada anak-anak di lingkungan</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di desa.</li> </ul>
	Kelompok	Pribadi

## Lampiran 2

### Bentuk-bentuk Partisipasi Sipil Pemuda yang Teridentifikasi Di Wilayah Kota Makassar dan Sekitarnya

Wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja bakti/membersihkan lingkungan</li> <li>- Aktif dalam organisasi kepemudaan setempat</li> <li>- Aktif dalam organisasi keagamaan</li> <li>- Berpartisipasi dalam organisasi keagamaan untuk pemuda (Remaja masjid) di sekolah</li> <li>- Menggalang dana untuk korban bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan hak pilih</li> <li>- Taat hukum dan mematuhi peraturan</li> <li>- Mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kerja bakti</li> <li>- Kerja bakti/membersihkan kota</li> <li>- Mempraktikkan 3M selama pandemi</li> <li>- Memperingati hari raya nasional: Melatih Paskibraka</li> <li>- Berpartisipasi dalam peringatan Hari Kemerdekaan</li> </ul>
Sukarela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktif dalam organisasi kebudayaan</li> <li>- Aktif dalam organisasi literasi</li> <li>- Aktif dalam organisasi kepemudaan setempat</li> <li>- Aktif dalam organisasi pecinta lingkungan</li> <li>- Aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam</li> <li>- Mengajar bahasa Inggris di Komunitas Pecinta Anak jalanan</li> <li>- Melakukan investigasi dari media lingkungan tentang kapasitas sampah</li> <li>- Komunitas desain daring di Facebook</li> <li>- Aktif dalam Komunitas Seni Perfilman</li> <li>- Aktif dalam Komunitas Gerakan Air Tawar</li> <li>- Aktif dalam organisasi pemuda (misalnya Logos)</li> <li>- Aktif dalam OSIS, BEM, organisasi di kampus</li> <li>- Aktif dalam komunitas untuk pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyumbang untuk amal</li> <li>- Memulai inisiasi untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial</li> <li>- Memulai inisiasi untuk berpartisipasi dalam gerakan/kegiatan pecinta lingkungan</li> <li>- Melakukan kampanye sosial/mengedukasi publik</li> <li>- Mencegah penyebaran informasi tidak akurat/informasi bohong/hoaks</li> <li>- Mengonsumsi dan mempromosikan produk lokal</li> <li>- Menjaga kebersihan lingkungan</li> <li>- Membimbing anak-anak sekolah di lingkungan</li> <li>- Ikut pawai lingkungan</li> <li>- Menandatangani petisi daring</li> <li>- Menginisiasi kegiatan seni: seminar mini, pameran seni, acara bincang-bincang, diskusi, seni teater</li> <li>- Melakukan advokasi mengenai kesadaran lingkungan untuk pemuda</li> <li>- Menginisiasi kegiatan literasi: membangun ruang membaca, menyediakan buku bacaan, membuat kelompok menulis</li> <li>- Membuat proyek video dokumenter mengenai lingkungan</li> <li>- Mengajar dengan membuat kelas-kelas kecil untuk anak-anak di lingkungan sekitar</li> <li>- Menjadi relawan untuk aktivitas sosial</li> <li>- Memperjuangkan hak pejalan kaki/pengguna trotoar</li> <li>- Membentuk tim SAR untuk membantu di wilayah bencana</li> <li>- Menjadi relawan mendistribusikan masker selama pandemi</li> </ul>
	Kelompok	Pribadi



 Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330 Indonesia

 +62 21 3193 6336

 +62 21 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute